



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

2017

OUTLOOK ZAKAT INDONESIA



PUSKAS BAZNAS
Pusat Kajian Strategis

Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jln. Kebon Sirih Raya, No. 57 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Website: www.puskasbaznas.com



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

2017

OUTLOOK ZAKAT INDONESIA

زكاة



PUSKAS BAZNAS
Pusat Kajian Strategis

Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jln. Kebon Sirih Raya, No. 57 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Website: www.puskasbaznas.com

OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2017

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS:

Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun:

Divisi Publikasi dan Jaringan

Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS

Penyunting:

Anggota BAZNAS

Direktur Amil Zakat Nasional BAZNAS

Direktur Koordinator Zakat Nasional BAZNAS

Direktur Umum BAZNAS

Hak Penerbit Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, Desember 2016

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3904555 Faks. (021) 3913777 Mobile.

+62857 8071 6819

Email: sekretariat@puskasbaznas.com

www.puskasbaznas.com

ISBN: 978-602-60689-0-3

TIM PENYUSUN OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2017

Penasihat : Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Dr. Zainulbahar Noor, SE., MEc
Dr. H. Mundzir Suparta, MA
Drs. Masdar Farid Mas'udi
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Drs. Irsyadul Halim
Ir. Nana Mintarti, MP
Prof. Dr. H. M. Machasin, MA
Drs. Nuryanto. MPA
Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax
Mohd. Nasir
Kiagus Mohammad Tohir
M. Arifin Purwakananta

Penanggung Jawab : Dr. Irfan Syauqi Beik

Ketua : Muhammad Hasbi Zaenal, Lc., MA.

Anggota : 1. Khonsa Tsabita, M.Ec
2. Amelya Dwi Astuti, S.Psi
3. Ayu Solihah Sadariyah, S.EI
4. Dr. Muhammad Choirin



OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSKAS BAZNAS	v
KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS	vi
BAB I GAMBARAN UMUM PERZAKATAN INDONESIA.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kerangka Regulasi dan Institusi Zakat di Indonesia	3
1.3 Potensi Zakat di Indonesia.....	5
1.4 Perkembangan Zakat di Indonesia.....	7
BAB II STATISTIK ZAKAT DI INDONESIA	9
2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan OPZ	9
2.2 Proporsi Penghimpunan berdasarkan Jenis Dana.....	10
2.3 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat (2010-2015) Secara Nasional dan pada Setiap OPZ	11
2.4 Proporsi Penghimpunan Dana Zakat Nasional berdasarkan OPZ	12
2.5 Pertumbuhan Penghimpunan Tahun 2010-2015	14
2.6 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan <i>Ashnaf</i> di setiap OPZ	15
2.7 Proporsi Penyaluran berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat	16
2.8 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan Bidang Penyaluran.....	17
BAB III PROSPEK PERTUMBUHAN ZAKAT	21
3.1 Pendahuluan	21
3.2 Proyeksi Efek Regulasi Zakat 2017	21
3.3 Proyeksi Penghimpunan Zakat 2017	23
3.4 Proyeksi Penyaluran Zakat 2017	29
3.5 Proyeksi <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR).....	35
3.6 Proyeksi Pertumbuhan <i>Muzakki</i>	38
3.7 Proyeksi Distribusi <i>Mustahik</i>	41
3.8 Proyeksi Pertumbuhan Zakat.....	45
BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG ZAKAT 2017	49
4.1 Pendahuluan	49

4.2	Masalah Sosial dan Kemiskinan di Indonesia	49
4.3	Pembangunan Keuangan Inklusif di Indonesia	52
4.4	Zakat sebagai Instrumen Keuangan Inklusif di Indonesia	53
4.5	Prospek Pembangunan Zakat 2017	55
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015).....	1
Tabel 2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	9
Tabel 2.2 Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana	10
Tabel 2.3 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat pada Tahun 2010-2015 Secara Nasional dan pada Setiap OPZ	11
Tabel 2.4 Pertumbuhan Penghimpunan Tahun 2010-2015.....	14
Tabel 2.5 Penyaluran Zakat berdasarkan <i>Ashnaf</i> di setiap OPZ	15
Tabel 2.6 Penyaluran Dana Zakat berdasarkan OPZ dalam <i>Ashnaf</i>	16
Tabel 2.7 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan Bidang Penyaluran	17
Tabel 3.1 Penghimpunan ZIS Perorangan di Indonesia*.....	23
Tabel 3.2 Penghimpunan ZIS Lembaga di Indonesia	25
Tabel 3.3 Penghimpunan ZIS di Indonesia*	26
Tabel 3.4 Distribusi Penghimpunan ZIS berdasarkan Provinsi*	28
Tabel 3.5 Penyaluran ZIS Perorangan di Indonesia*	29
Tabel 3.6 Penyaluran ZIS Kelompok di Indonesia*	30
Tabel 3.7 Penyaluran ZIS di Indonesia*	31
Tabel 3.8 Distribusi Penyaluran ZIS berdasarkan Provinsi*	33
Tabel 3.9 <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) berdasarkan Provinsi (2016)	35
Tabel 3.10 Total <i>Muzakki</i> di Indonesia*	38
Tabel 3.11 Distribusi <i>Muzakki</i> berdasarkan Provinsi* (tahun 2012-2016).....	39
Tabel 3.12 Total <i>Mustahik</i> di Indonesia*	41
Tabel 3.13 Distribusi <i>Mustahik</i> berdasarkan Provinsi* (tahun 2012-2016)	43
Tabel 5.1 Profil LAZ Resmi di Indonesia	65
Tabel 5.2 Aspek Legalitas.....	72
Tabel 5.3 Aspek Akuntabilitas dan Kepatuhan Syariah	72
Tabel 5.4 Aspek IT dan Sistem	73
Tabel 5.5 Aspek Pengumpulan dan Penyaluran.....	73
Tabel 5.6 Aspek Pengembangan Amil.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Kelembagaan Zakat di Indonesia	5
Gambar 2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan OPZ	10
Gambar 2.2 Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana	10
Gambar 2.3 Proporsi Penghimpunan Zakat berdasarkan OPZ	13
Gambar 3.1 Penghimpunan ZIS Perorangan di Indonesia	24
Gambar 3.2 Penghimpunan ZIS Lembaga di Indonesia	25
Gambar 3.3 Penghimpunan ZIS di Indonesia	26
Gambar 3.4 Penyaluran ZIS Perorangan di Indonesia	30
Gambar 3.5 Penyaluran ZIS Kelompok di Indonesia	31
Gambar 3.6 Penyaluran ZIS di Indonesia	32
Gambar 3.7 Total <i>Muzakki</i> di Indonesia	39
Gambar 3.8 Total <i>Mustahik</i> di Indonesia	42
Gambar 3.9 Pertumbuhan Zakat di Indonesia (tahun 2002-2015).....	45
Gambar 3.10 Pertumbuhan GDP di Indonesia (tahun 2002-2015).....	45

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS



Oleh:

Dr. Irfan Syauqi Beik

Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahiim.*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya menjelang akhir tahun 2016 ini, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempersembahkan buku *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Kehadiran perdana buku ini diharapkan akan menjadi acuan dan sumber informasi bagi para *stakeholders* perzakatan Indonesia, dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat pada tahun 2017.

Selain memuat proyeksi perzakatan di Indonesia, *Outlook Zakat Indonesia 2017* ini memaparkan perkembangan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap bahwa *Outlook Zakat Indonesia 2017* ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika perzakatan Indonesia.

Semoga buku ini mampu menjadi sumbangsih yang nyata bagi perkembangan dunia perzakatan di Indonesia maupun bagi khazanah keilmuan di kalangan kaum muslimin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA PENGANTAR

KETUA BAZNAS



Oleh:

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Ketua BAZNAS

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahiim.*

Pada hari ini, Indonesia sebagai negara dengan warga negara Muslim terbesar di dunia, idealnya dapat menjadi kiblat bagi negara-negara lain dalam ikhwal praktik, studi, dan *sharing knowledge* subjek keislaman. Idealisme itu menjadi salah satu misi BAZNAS di ranah perzakatan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dengan cakupan dimensi yang luas, mulai dari aspek keimanan, ekonomi, dan sosial; suatu dimensi persoalan yang besar untuk bangsa sebesar Indonesia. Untuk itulah, amat disayangkan ketika dinamika perzakatan Indonesia tidak terekam dengan baik dan tepat, atau hanya diperbincangkan dengan landasan kata “kira-kira”. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran perdana buku *Outlook Zakat Indonesia 2017*, sebuah publikasi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS).

Outlook Zakat Indonesia 2017 menjadi penting karena hingga hari ini, Indonesia –yang kembali saya tekankan sebagai negara Muslim terbesar di dunia– belum memiliki publikasi sejenis yang mengkomprehensikan data dan proyeksi penghimpunan dan penyaluran zakat pada skala nasional. Di samping itu, hadirnya *Outlook Zakat Indonesia* ini juga merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS perjuangkan demi kebangkitan zakat Indonesia. Ke depannya, *Outlook Zakat Indonesia* akan diterbitkan secara berkala dan akan terus memperkaya khazanah perzakatan Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran konstruktif untuk menghasilkan *Outlook Zakat Indonesia* yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



BAZNAS
KOTA YOGYAKARTA

an Sedekah Harian

ODOT

One Day
One Thousand

*Programnya,
atkan Kotaknya*



24 JAM
LAYANAN
DONASI

enter : (0274) 549754
085 727 386 870
085 292 290 348
baznas.jogjakota.go.id

BAZNAS
KOTA YOGYAKARTA

GERAI ZAKAT



**“2.5% Zakat
100% Manfa**

ODOT

One Day
One Thousand

24 JAM
LAYANAN
ZAKAT

Alamat Kantor :
Lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro
Balakota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta
☎ (0274) 549754 | 085727386870
🌐 <https://www.facebook.com/baznas.jogjakota>

EMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



GAMBARAN UMUM PERZAKATAN INDONESIA

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015)

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.

Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan oleh Tabel 1.1 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pada tingkat internasional, perzakatan Indonesia juga telah mendapat pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak. Dalam Mukhtamar Zakat Internasional ke -8 di Beirut pada tahun 2010, para peserta delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah mengakui kinerja pendayagunaan zakat Indonesia yang kreatif dan inovatif (IZDR, 2012). Islamic Development Bank (IDB) juga meminta Indonesia untuk melakukan '*reverse linkage program*' mengenai pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan di berbagai pembiayaan usaha mikro dan kecil kepada seluruh negara-negara anggota IDB. Prestasi lainnya yaitu Indonesia berkontribusi sebagai salah satu tim penyusun dalam upaya standarisasi sistem zakat global yang terangkum pada dokumen *Zakat Core Principles*

(Dokumen ini telah disahkan pada World Humanitarian Summit) di Istanbul, Turki pada 23-24 Mei 2016. Berbagai prestasi dan apresiasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Indonesia semakin diakui di dunia internasional dan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan zakat global ke depan.

Pertumbuhan zakat dan prestasi di tingkat internasional yang luar biasa ini, pada kenyataannya belum dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja amil zakat di dalamnya. Masih terdapat banyak permasalahan dan tantangan untuk membenahi perzakatan nasional, seperti lemahnya kualitas dan kuantitas SDM perzakatan, belum meratanya kinerja OPZ di seluruh daerah di Indonesia, kurangnya penataan sistem dan kelembagaan zakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja sama pengelolaan zakat secara nasional, serta minimnya kajian, riset, dan integrasi data perzakatan nasional. Untuk itulah, sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata dalam upaya memajukan perzakatan nasional, Outlook Zakat Indonesia 2017 disusun untuk memberikan potret perkembangan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun dengan didukung oleh data-data yang ada dan mencoba menyajikan proyeksi perzakatan Indonesia ke depannya.

1.2 Kerangka Regulasi dan Institusi Zakat di Indonesia

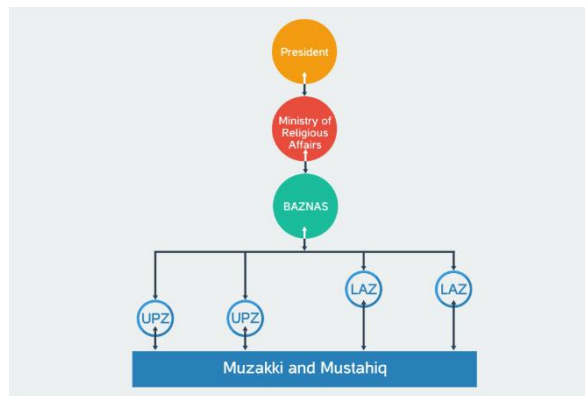
Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat, zakat merupakan sumber dana perjuangan pembebasan dari penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Setelah kemerdekaan, melalui Departemen Agama pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan/Amil Zakat. Tetapi, PMA ini dicabut sebelum diimplementasikan. Akhirnya, pemerintah bersedia mengeluarkan peraturan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991.

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat UU No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai

Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.

UU No. 23/2011 berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk “meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” (Pasal 3). Dalam UU ini, BAZNAS ditunjuk sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). Secara umum, BAZNAS memiliki dua tugas utama: (1) mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, (2) melaksanakan fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.

Peraturan lainnya terkait pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2014. PP No. 14/2014 mengatur BAZNAS untuk memiliki anggota tertinggi BAZNAS yang ditunjuk oleh presiden. Di sisi lain, Inpres No. 3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Selain itu, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 juga telah menyusun klasifikasi untuk lembaga amil zakat (LAZ) resmi. Terdapat tiga kategori LAZ yaitu LAZ Nasional (jika penghimpunan zakat mencapai Rp 50 miliar), LAZ Provinsi (jika penghimpunan zakat mencapai Rp 20 miliar), LAZ Kabupaten/Kota (jika penghimpunan zakat mencapai Rp 3 miliar). Peraturan-peraturan ini dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi nasional. Untuk alur struktur kelembagaan zakat di Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Kelembagaan Zakat di Indonesia

Sumber : Islamic Social Finance Report (2014)

1.3 Potensi Zakat di Indonesia

Dunia zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Pada satu dekade terakhir, zakat mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari pertumbuhannya. Namun, pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya. Menurut Kahf, total potensi zakat di negara-negara anggota OIC berkisar antara 1,8 – 4,34 persen dari total PDB. Jika potensi zakat ini dikalikan dengan PDB harga berlaku tahun 2010 dari negara-negara anggota OIC, maka potensi zakat dunia mencapai USD 600 miliar (Beik, 2015).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut juga sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ ke dalam program nasional pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan MAKSI, BAZNAS diarahkan sebagai koordinator dalam pengaturan, pengumpulan, dan distribusi zakat nasional, dengan Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS.

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. *Pertama*, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10

kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per *muzakki* mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. *Kedua*, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah *muzakki* dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen *muzakki* yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. *Keempat*, penelitian Firdaus *et al* (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. *Kelima*, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya (dapat dilihat di Tabel 1.1).

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal.
2. Basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook 2010).

1.4 Perkembangan Zakat di Indonesia

Perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek. *Pertama*, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. Regulasi-regulasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya memajukan perzakatan nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Kedua, adanya peningkatan jumlah ZIS di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menandakan bahwa populasi Muslim Indonesia semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, peningkatan jumlah data ZIS ini juga menjadi salah satu tanda bahwa semakin banyak pegiat zakat di Indonesia. *Ketiga*, potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.



BAB II

STATISTIK ZAKAT DI INDONESIA

Pada bab ini akan dipaparkan laporan statistik pengelolaan zakat di Indonesia dalam waktu lima tahun terakhir secara umum serta tahun 2015 secara khusus. Laporan statistik tersebut meliputi jumlah penghimpunan dan penyaluran dana, proporsi penghimpunan berdasarkan jenis dana maupun organisasi pengelola zakat (OPZ), pertumbuhan penghimpunan, serta proporsi penyaluran berdasarkan *ashnaf*, OPZ, dan bidang penyaluran.

2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia, terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dengan rincian dana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

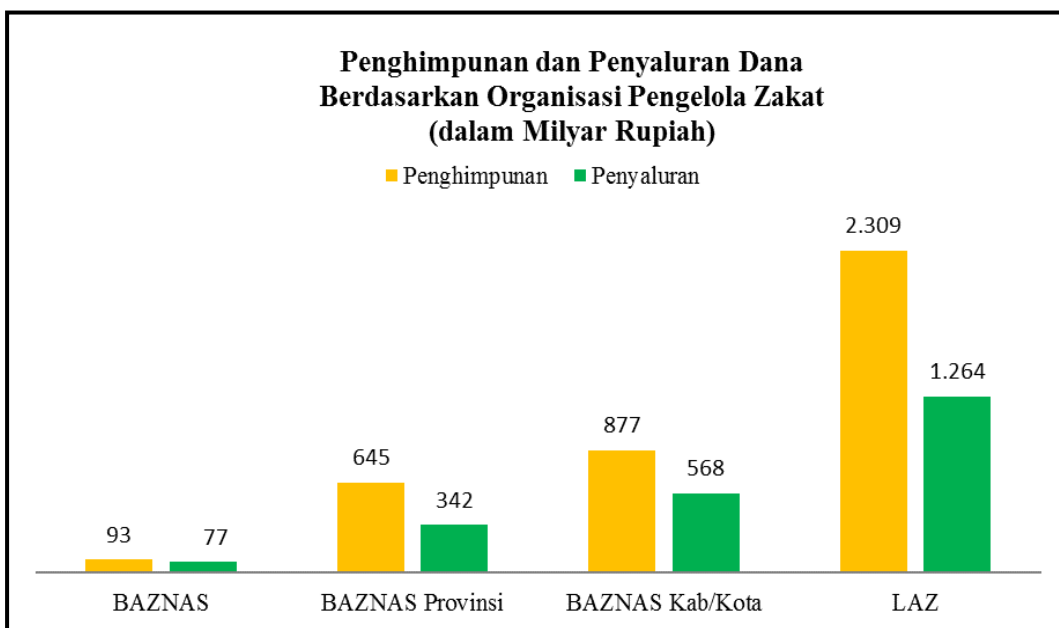
Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	92.568.574.079	2,53	77.163.263.785	3,43	61,6 %
BAZNAS Provinsi	644.859.329.420	17,65	342.186.614.275	15,20	
BAZNAS Kab/Kota	876.626.483.800	24,00	568.772.590.869	25,26	
LAZ	2.039.218.862.993	55,82	1.263.512.276.616	56,11	
Total	3.653.273.250.292	100,00	2.251.634.745.545	100,00	Cukup Efektif ¹

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Salah satu indikator yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif. Pada tahun 2015 ini, total penghimpunan dana mengalami pertumbuhan sebesar 10,71 persen dibandingkan dengan tahun 2014. OPZ yang terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ secara kumulatif memperoleh

¹ Berdasarkan *Zakat Core Principles*

tingkat daya serap sebesar 61,6 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa OPZ pada tahun ini dinilai cukup efektif dalam penyerapan dana yang digunakan.



Gambar 2.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

2.2 Proporsi Penghimpunan berdasarkan Jenis Dana

Dana yang didapatkan oleh OPZ ini berasal dari dana zakat, infaq/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan dana lainnya. Realisasi masing-masing dana yang tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Realisasi 2015	Persentase
1	Zakat ²	2,312,195,596,498	63.29
2	Infaq/Sedekah	1,176,558,166,696	32.21
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163,986,086,154	4.49
4	Dana Lainnya ³	533,400,945	0.01
	Jumlah	3,653,273,250,292	100.00

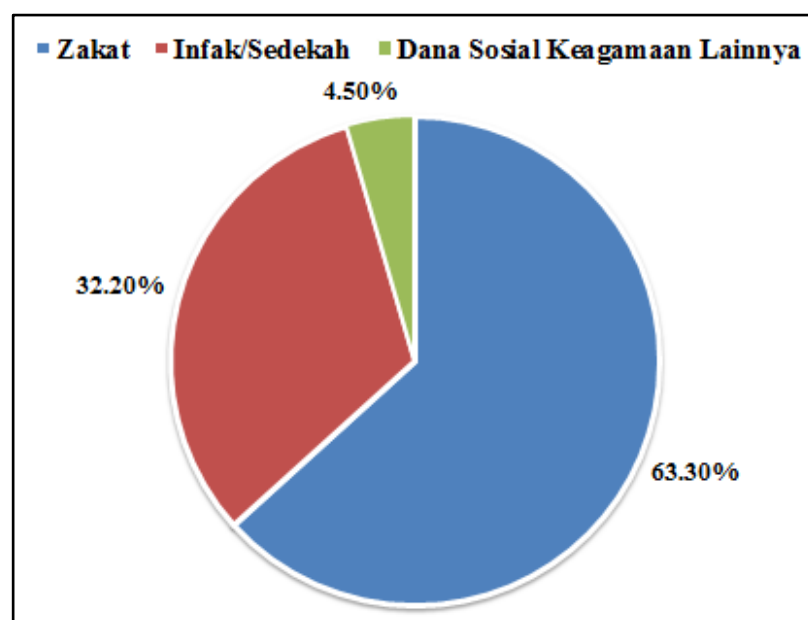
Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Dana yang didapatkan didominasi oleh pendapatan zakat sebesar 63,29 persen, infaq/sedekah sebesar 32,21 persen, DSKL 4,49 persen dan dana lainnya sebesar 0,01 persen. Dana zakat memiliki proporsi total penghimpunan paling

² Termasuk Zakat Fitrah

³ Merupakan penerimaan bagi hasil bank (dana non halal)

besar dibandingkan dengan infaq/sedekah, DSKL, dan dana lainnya. Adapun besaran dana yang terkumpul dari BAZNAS sebesar Rp 83.036.651.592,00 BAZNAS Provinsi sebesar Rp 561.918.633.628,00 BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Rp 941.559.715.589,00.



Gambar 2.2 Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana
Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

2.3 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat pada Tahun 2010-2015 Secara Nasional dan pada Setiap OPZ

Tabel 2.3 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat pada Tahun 2010-2015 Secara Nasional dan pada Setiap OPZ

Tahun	BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/ Kota	LAZ	Nasional	Pertumbuhan
2010	33.125.920.074	306.512.258.082	525.608.580.693	634.917.482.126	1.500.164.240.975	
2011	40.403.967.865	204.482.157.749	824.014.964.426	659.963.269.358	1.728.864.359.398	15,25%
2012	50.212.435.875	253.252.821.346	1.179.716.104.080	729.217.590.043	2.212.398.951.344	27,97%
2013	59.238.304.066	1.645.482.867.203	281.687.974.612	653.194.923.848	2.639.604.069.729	19,31%
2014	82.293.545.780	415.451.020.092	1.422.364.285.476	1.379.891.148.652	3.300.000.000.000	25,02%
2015	94.068.893.820	642.797.514.841	885.309.169.850	2.028.193.434.453	3.650.369.012.964	10,62%

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

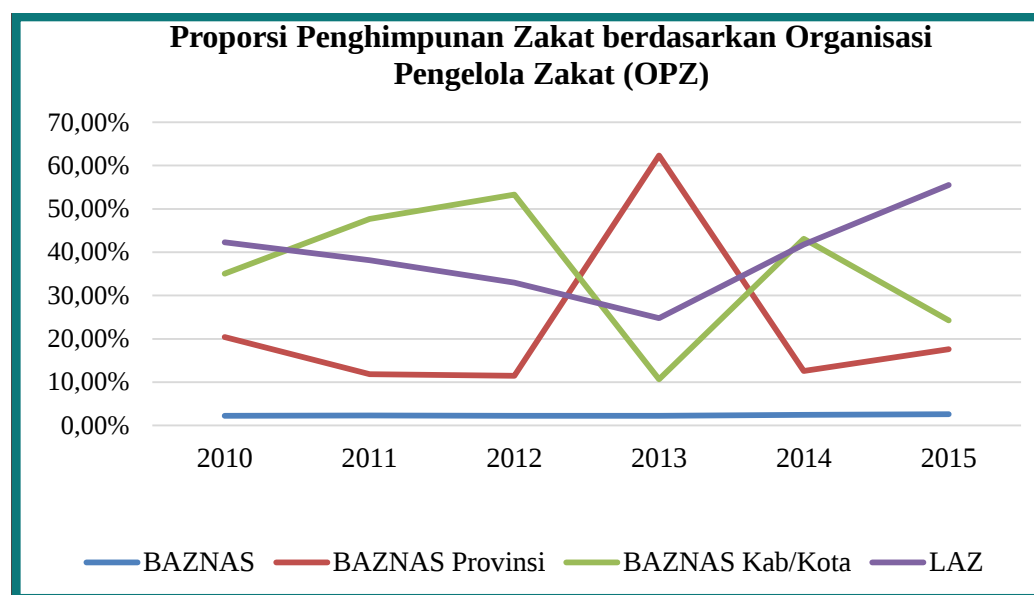
Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul.

Peningkatan yang konsisten di tingkat OPZ hanya ditemukan di BAZNAS. Dari tahun 2010 hingga 2015, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS meningkat setiap tahun. Namun, jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut lebih rendah daripada jumlah dana yang dikumpulkan oleh

lembaga-lembaga lainnya. Di sisi lain, LAZ hampir memiliki peningkatan dana zakat yang konsisten dari 2010 ke 2015, kecuali pada tahun 2013, ketika dana zakat yang terkumpul lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Berbeda dengan kedua lembaga yang telah dipaparkan sebelumnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki pertumbuhan dana zakat yang sangat fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2015. Selain penurunan pada tahun 2013 seperti apa yang terjadi pada LAZ, BAZNAS Kabupaten/Kota juga mengalami penurunan jumlah penghimpunan dana zakat di tahun 2015. Sebaliknya, BAZNAS Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dari dana zakat yang terkumpul pada tahun 2013. Penurunan jumlah penghimpunan dana zakat justru terjadi pada tahun 2011 dan 2014.

2.4 Proporsi Penghimpunan Dana Zakat Nasional berdasarkan OPZ



Gambar 2.3 Proporsi Penghimpunan Zakat berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Secara umum, proporsi penghimpunan dana zakat dari setiap OPZ terhadap penghimpunan dana zakat nasional bervariasi dari tahun 2010 sampai 2015. Akan tetapi, proporsi penghimpunan BAZNAS konsisten berada di urutan terbawah daripada yang lain, yaitu di bawah tiga persen setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, proporsi penghimpunan dana zakat nasional berasal dari LAZ dengan proporsi 42,32 persen. BAZNAS Kabupaten/Kota berada di urutan kedua dengan proporsi 35,04 persen, sementara BAZNAS Provinsi berkontribusi sebanyak 20,43 persen dari jumlah dana zakat nasional pada tahun tersebut. Pada tahun berikutnya, BAZNAS Kabupaten/Kota menggeser posisi LAZ dengan proporsi 47,66 persen sedangkan proporsi LAZ menurun menjadi 38,17 persen. Proporsi BAZNAS Provinsi juga menurun sampai 11,83 persen. Urutan ini bertahan hingga tahun 2012 dengan persentase yang berbeda.

Pada tahun 2013, BAZNAS Provinsi memimpin bagian dengan proporsi sebanyak 62,34 persen. Proporsi LAZ masih menurun tetapi tetap di urutan kedua, sementara proporsi BAZNAS Kabupaten/Kota menurun drastis hingga menjadi 10,67 persen. Tahun berikutnya, proporsi BAZNAS Provinsi kembali berada di urutan ketiga tetapi sedikit lebih tinggi daripada proporsi sebelum memuncak di

tahun sebelumnya. Proporsi BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ meningkat kembali menjadi masing-masing 43,10 persen dan 41,81 persen. Kemudian, pada tahun 2015, LAZ kembali mendominasi bagian dengan proporsi sebesar 55,56 persen. Proporsi BAZNAS Kabupaten/Kota lagi-lagi menurun menjadi 24,25 persen, dan BAZNAS Provinsi berada di bawahnya meskipun meningkat dari tahun sebelumnya. Secara umum, dari tahun 2010 hingga 2015, kontribusi setiap OPZ dalam menghimpun dana bervariasi setiap tahunnya, kecuali proporsi BAZNAS yang senantiasa meningkat meskipun hanya sedikit demi sedikit.

2.5 Pertumbuhan Penghimpunan Tahun 2010-2015

Tabel 2.4 Pertumbuhan Penghimpunan Tahun 2010-2015

Tahun	BAZNAS	BAZNAS Provinsi	BAZNAS Kab/ Kota	LAZ	Nasional	Pertumbuhan
2010	33.125.920.074	306.512.258.082	525.608.580.693	634.917.482.126	1.500.164.240.975	
2011	40.403.967.865	204.482.157.749	824.014.964.426	659.963.269.358	1.728.864.359.398	15,25%
2012	50.212.435.875	253.252.821.346	1.179.716.104.080	729.217.590.043	2.212.398.951.344	27,97%
2013	59.238.304.066	1.645.482.867.203	281.687.974.612	653.194.923.848	2.639.604.069.729	19,31%
2014	82.293.545.780	415.451.020.092	1.422.364.285.476	1.379.891.148.652	3.300.000.000.000	25,02%
2015	94.068.893.820	642.797.514.841	885.309.169.850	2.028.193.434.453	3.650.369.012.964	10,62%

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul.

Peningkatan yang konsisten di tingkat OPZ hanya ditemukan di BAZNAS. Dari tahun 2010 hingga 2015, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS meningkat setiap tahun. Namun, jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut lebih rendah daripada jumlah dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Di sisi lain, LAZ hampir memiliki peningkatan dana zakat yang konsisten dari 2010 ke 2015, kecuali pada tahun 2013, ketika dana zakat yang terkumpul lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Berbeda dengan kedua lembaga yang telah dipaparkan sebelumnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki pertumbuhan dana zakat yang sangat fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2015. Selain penurunan pada tahun 2013 seperti apa yang terjadi pada LAZ, BAZNAS Kabupaten/Kota juga mengalami penurunan jumlah penghimpunan dana zakat di tahun 2015. Sebaliknya, BAZNAS Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dari dana zakat yang terkumpul pada tahun 2013. Penurunan jumlah penghimpunan dana zakat justru terjadi pada tahun 2011 dan 2014.

2.6 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan *Ashnaf* di setiap OPZ

Sesuai dengan Q.S. At-Taubah: 60, dana zakat didistribusikan ke delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqob*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Karena fakir dan miskin biasanya berada di lingkungan yang sama, data jumlah dana yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut seringkali digabungkan. Sementara itu, dana zakat yang dialokasikan untuk amil relatif sama di setiap lembaga, yakni seperdelapan dari total yang penghimpunan dana zakat.

Tabel 2.5 Penyaluran Zakat berdasarkan *Ashnaf* di setiap OPZ

<i>Ashnaf</i>	Nasional		OPZ							
			BAZNAS		BAZNAS Provinsi		BAZNAS Kab/Kota		LAZ	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Fakir Miskin	1.524.058	74,36	50.733	89,32	222.496	67,23	371.362	76,19	879.467	74,89
Mualaf	19.098	0,93	10	0,02	7.296	2,20	5.882	1,21	5.911	0,50
<i>Riqob</i>	10.627	0,52	0	0,00	149	0,04	1.087	0,22	9.391	0,80
<i>Gharimin</i>	13.214	0,64	1.050	1,85	2.649	0,80	6.734	1,38	2.780	0,24
<i>Fi Sabilillah</i>	459.056	22,4	4.859	8,55	84.623	25,57	94.252	19,34	275.322	23,44
<i>Ibnu Sabil</i>	23.484	1,15	150	0,26	13.750	4,15	8.087	1,66	1.497	0,13
Total	2.049.537	100	56.803	100	330.962	100	487.405	100	1.174.367	100

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Pada tahun 2015, secara nasional, sebagian besar dana zakat dialokasikan untuk kelompok fakir dan miskin, yaitu sekitar satu setengah triliun rupiah atau 74,36 persen dari total dana zakat diluar alokasi untuk amil. Di setiap OPZ, kelompok fakir dan miskin juga merupakan kelompok penerima dana zakat tertinggi dengan alokasi di atas 50 persen. *Fi sabilillah* adalah kelompok penerima tertinggi kedua secara nasional dengan alokasi sekitar setengah triliun rupiah, atau 22,40 persen, dan juga merupakan kelompok penerima tertinggi kedua di setiap OPZ. *Ibnu sabil*, mualaf, *gharimin* dan *riqob* adalah kelompok dengan alokasi terendah secara nasional dengan total alokasi masing-masing sekitar 23,5 miliar, 19 miliar, 13 miliar, dan 10 miliar rupiah atau 1,15 persen, 0,93 persen, 0,64 persen, dan 0,52 persen dari total penghimpunan dana zakat diluar dari alokasi amil.

Di setiap OPZ, proporsi penyaluran ini bervariasi. BAZNAS Provinsi, seperti halnya secara nasional, menempatkan *ibnu sabil*, mualaf, *gharimin*, dan *riqob* berurutan, meskipun proporsinya berbeda dari nasional. BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten/Kota juga menempatkan *riqob* sebagai kelompok dengan alokasi paling sedikit, tetapi BAZNAS mengalokasikan *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mualaf berturut-turut di atas *riqob* sementara BAZNAS Kabupaten/Kota menempatkan *ibnu sabil*, *gharimin*, dan mualaf berturut-turut sebelum *riqob*, yang bahkan tidak mendapat alokasi dana zakat. Sementara itu, LAZ mengalokasikan dana zakat untuk *riqob* lebih dari alokasi untuk mualaf, *gharimin*, dan *ibnu sabil* berturut-turut.

2.7 Proporsi Penyaluran berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Tabel 2.6 Penyaluran Dana Zakat berdasarkan OPZ dalam Ashnaf

OPZ	Fakir Miskin	Mualaf	<i>Riqob</i>	<i>Gharimin</i>	<i>Fi Sabilillah</i>	<i>Ibnu Sabil</i>
BAZNAS	3.33 %	0.05 %	0.00 %	7.95 %	1.06 %	0.64 %
BAZNAS Provinsi	14.60 %	38.20 %	1.40 %	20.05 %	18.43 %	58.55 %
BAZNAS Kab/Kota	24.37 %	30.80 %	10.23 %	50.97 %	20.53 %	34.44 %
LAZ	57.71 %	30.95 %	88.37 %	21.04 %	59.98 %	6.37 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Pada empat dari tujuh kelompok *ashnaf* selain amil, yakni fakir dan miskin, *riqob* serta *fi sabilillah*, sebagian besar dana zakat disalurkan oleh LAZ. LAZ berkontribusi 57,71 persen dari total dana zakat yang diterima oleh fakir dan miskin, 88,7 persen yang diterima oleh *riqob*, dan 59,98 persen yang diterima oleh *fi sabilillah*. Sementara itu, dana zakat untuk *gharimin* disalurkan sebagian besar oleh BAZNAS Kabupaten/Kota,

khususnya 50,97 persen dari total penyaluran untuk kelompok tersebut. *Ibnu sabil* menerima sebagian besar dana zakat, yaitu 58,55 persen dari BAZNAS Provinsi. Sementara itu, mualaf menerima dana zakat dari BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS Kabupaten/Kota kurang lebih sama, secara berturut-turut yaitu 38,20 persen, 30,95 persen, dan 30,80 persen dari total dana zakat yang diterima oleh kelompok tersebut.

2.8 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan Bidang Penyaluran

Tabel 2.7 Proporsi Penyaluran Zakat berdasarkan Bidang Penyaluran

Bidang Penyaluran	BAZNAS		BAZNAS Provinsi		BAZNAS Kab/Kota		LAZ		Nasional	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Ekonomi	5.161	9,09	29.662	12,98	119.878	21,46	183.330	13,02	338.031	15,01
Pendidikan	18.845	33,18	24.343	10,65	102.016	18,26	312.991	22,23	458.195	20,35
Dakwah	3.480	6,13	52.046	22,78	77.702	13,91	201.523	14,32	334.750	14,87
Kesehatan	13.975	24,6	6.527	2,86	36.632	6,56	134.286	9,54	191.420	8,5
Sosial	15.342	27,01	115.928	50,73	222.406	39,81	575.564	40,89	929.239	41,27
Total	56.803	100	228.504	100	558.634	100	1.407.694	100	2.251.635	100

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Dana zakat didistribusikan di beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara bidang-bidang tersebut, bidang sosial memiliki alokasi tertinggi secara nasional dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau

hampir satu triliun rupiah. Sekitar setengah dari itu, yaitu 20,35 persen atau hampir 500 miliar rupiah, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah mengikuti dengan alokasi masing-masing 15,01 persen atau sekitar 340 miliar rupiah dan 14,87 persen

atau sekitar 330 miliar rupiah, dan proporsi terkecil dari distribusi zakat yakni sebesar 8,5 persen atau sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan di sektor kesehatan.

Di BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sebagian besar dana zakat juga dialokasikan di sektor sosial, dengan alokasi masing-masing 50,73 persen, 40,89 persen, dan 39,81 persen. Alokasi terkecil dari dana zakat di lembaga-lembaga ini juga di sektor kesehatan. Namun, sektor lainnya bervariasi. BAZNAS Provinsi mengalokasikan dana zakat di sektor dakwah sebagai yang tertinggi kedua setelah sosial dengan alokasi 22,78 persen, diikuti oleh ekonomi dengan alokasi 12,98 persen dan pendidikan dengan alokasi 10,65 persen. Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten/Kota mengalokasikan 21,46 persen dari

dana zakat di sektor ekonomi, diikuti oleh sektor pendidikan dan dakwah dengan alokasi masing-masing 18,26 persen dan 13,91 persen. Sementara itu, alokasi tertinggi kedua dana zakat di LAZ dialokasikan di sektor pendidikan dengan alokasi 22,23 persen, diikuti oleh sektor dakwah dan ekonomi dengan alokasi masing-masing 14,32 persen dan 13,02 persen.

Tidak seperti di lembaga zakat lainnya, alokasi tertinggi dana zakat di BAZNAS adalah di sektor pendidikan dengan alokasi sebesar 33,18 persen. Sektor sosial memiliki alokasi tertinggi kedua dengan alokasi sebesar 27,01 persen, diikuti oleh sektor kesehatan, ekonomi, dan dakwah dengan alokasi masing-masing 24,60 persen, 9,09 persen, dan 6,13 persen.





BAB III

PROSPEK PERTUMBUHAN ZAKAT

3.1 Pendahuluan

Sebagai bagian dari elemen perekonomian Islam, zakat mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan institusi zakat dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak kalah pentingnya dengan fungsi institusi keuangan Islam yang lain. Eksistensi institusi zakat yang ada diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, dan menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif.

Kemiskinan di Indonesia menurut BPS per Maret 2015 adalah 11,22 persen atau 28.590.000 jiwa, menggunakan tolok ukur pengeluaran USD 1,2/hari/per kapita. Jika digunakan tolok ukur yang digunakan World Bank, yaitu USD 2/hari/kapita, maka angka kemiskinan akan melonjak menjadi sekitar 40 persen. Hal ini dimulai sejak era reformasi dimana kesenjangan sosial terus memburuk. Ini dibuktikan dengan angka rasio gini yang sudah mencapai ambang batas yang menurut konsensus ekonom dianggap tidak lagi wajar yaitu 0,40 pada 2010. Artinya, pada tahun itu satu persen golongan terkaya menguasai 40 persen aset nasional.

3.2 Proyeksi Efek Regulasi Zakat 2017

Dengan memperhatikan perkembangan regulasi zakat dan memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, maka kita dapat memperkirakan berbagai perkembangan zakat sebagai efek dari kebijakan regulasi yang terjadi pada tahun 2017, yaitu:

Pertama, dengan perbaikan regulasi dan tata kelola zakat, diperkirakan zakat pada tahun 2017 akan tumbuh sebesar 30 persen. Sehingga capaian penghimpunan zakat secara nasional pada tahun 2016 mencapai Rp 5,46 triliun. Angka ini artinya tingkat pencapaian penghimpunan zakat masih berada pada kisaran 2,5 persen dari potensinya.

Kedua, dengan pembatasan bahwa syarat minimal penghimpunan zakat di tahun mendatang bagi LAZNAS adalah Rp 50 milyar, maka ke depannya akan ada seleksi ketat dalam proses pendirian LAZNAS di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, konsekuensinya LAZNAS yang ingin beroperasi secara resmi harus mendapatkan izin dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama dengan pertimbangan BAZNAS) dan dituntut untuk mengelola zakatnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga, jumlah unit pengelola zakat (UPZ) akan semakin banyak, akibat terjadi arus formalisasi organisasi para pengelola zakat

informal. Pengelola zakat di masjid, pesantren, sekolah dan BMT yang pengumpulan dananya masih kecil akan berbondong-bondong membentuk atau menjadi UPZ. Belum lagi ditambah pengelola zakat di lembaga negara dan perusahaan negara, menjadikan jumlah UPZ semakin banyak.

Keempat, peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia semakin signifikan. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki BAZNAS berdasarkan undang-undang dan regulasi turunannya. Kita berharap posisi BAZNAS yang sangat strategis ini dapat dioptimalkan melalui kualitas kepemimpinan dan manajemen BAZNAS yang semakin baik, khususnya dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan zakat di Indonesia.

Kelima, LAZ dituntut semakin berkualitas. Akibat perbaikan tata kelola zakat di Indonesia, khususnya dengan adanya fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BAZNAS dan Kementerian Agama, LAZ harus meningkatkan kualitas lembaganya.

3.3 Proyeksi Penghimpunan Zakat 2017

Secara periodik, penghimpunan zakat menunjukkan tren yang terus meningkat. BAZNAS telah memproyeksikan penghimpunan dana zakat dari para *muzakki* pada tahun 2016 dapat mencapai Rp 5 triliun. Sampai saat ini proses kalkulasi penghimpunan dana zakat masih terus dilakukan. Penggunaan sistem pelaporan ini sesuai dengan UU No. 23/2011, dimana seluruh lembaga zakat di Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan laporan zakat kepada BAZNAS.

Akan tetapi dalam kenyataannya, hal ini belum berjalan secara optimal. Sistem IT SIMBA⁴ yang mulai dikembangkan oleh BAZNAS pada tahun 2012 untuk memfasilitasi sistem pelaporan lembaga zakat, hingga tahun 2016 ini penggunaannya masih terbatas pada lingkup BAZNAS yang meliputi BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah. Walaupun SIMBA sudah disosialisasikan kepada lembaga zakat resmi, sistem ini masih belum diaplikasikan secara optimal oleh lembaga-lembaga zakat tersebut. Jadi, data riil penghimpunan zakat melalui sistem ini belum bisa memotret keseluruhan penghimpunan zakat dari seluruh lembaga zakat di Indonesia.

Secara umum, data penghimpunan zakat dapat dibagi menjadi penghimpunan zakat perorangan, lembaga, total penghimpunan, dan distribusi penghimpunan zakat per provinsi di Indonesia. Per November 2016, BAZNAS telah menerima data penghimpunan zakat yang ter-input di SIMBA sebagaimana yang ditampilkan oleh Tabel 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 serta Gambar 3.1, 3.2, dan 3.3.

Tabel 3.1 Penghimpunan ZIS Perorangan di Indonesia*

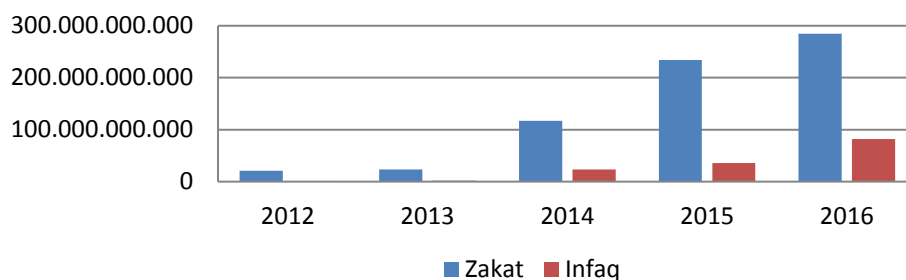
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Zakat	20.779.335.226	23.320.146.044	117.085.731.136	234.207.296.949	284.775.967.586
Infaq Sedekah	1.407.465.859	1.635.310.122	23.499.642.443	35.677.250.486	81.729.424.572
TOTAL	22.186.801.085	24.955.456.166	140.585.373.579	269.884.547.435	366.505.392.158

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

⁴ Sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) ini mempunyai dua kategori utama yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-input database *muzakki*, transaksi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input database *mustahik* dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan, akan diinput dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil *muzzaki*, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil *ashnaf*, dan jenis program penyaluran. Laporan keuangan dalam SIMBA mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Penghimpunan ZIS Perorangan di Indonesia



Gambar 3.1 Penghimpunan ZIS Perorangan di Indonesia

Tabel 3.1 menunjukkan penghimpunan ZIS perorangan di Indonesia per November 2016. Penghimpunan zakat perorangan yang terdata di SIMBA dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 264 miliar atau 1270,48 persen. Untuk dana infaq sedekah perorangan, jumlah dari tahun 2012 hingga 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 80,3 miliar atau 5706,85 persen. Sedangkan untuk total penghimpunan ZIS perorangan mengalami peningkatan sebesar Rp 344,3 miliar atau 1551,91 persen. Selain itu, Tabel 3.1 juga menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS perorangan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 463,35 persen.

Jumlah peningkatan yang sangat signifikan baik pada zakat maupun infaq sedekah perorangan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan peningkatan ini. Pertama, semakin berkembangnya SIMBA sehingga perkembangan data riil penghimpunan zakat terkini dari berbagai daerah di Indonesia akan semakin baik. Kedua, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Dari data dan penjelasan tersebut, dapat diproyeksikan bahwa penghimpunan zakat perorangan pada tahun 2017 akan terus meningkat sesuai dengan tren peningkatan penghimpunan zakat pada tahun-tahun sebelumnya.

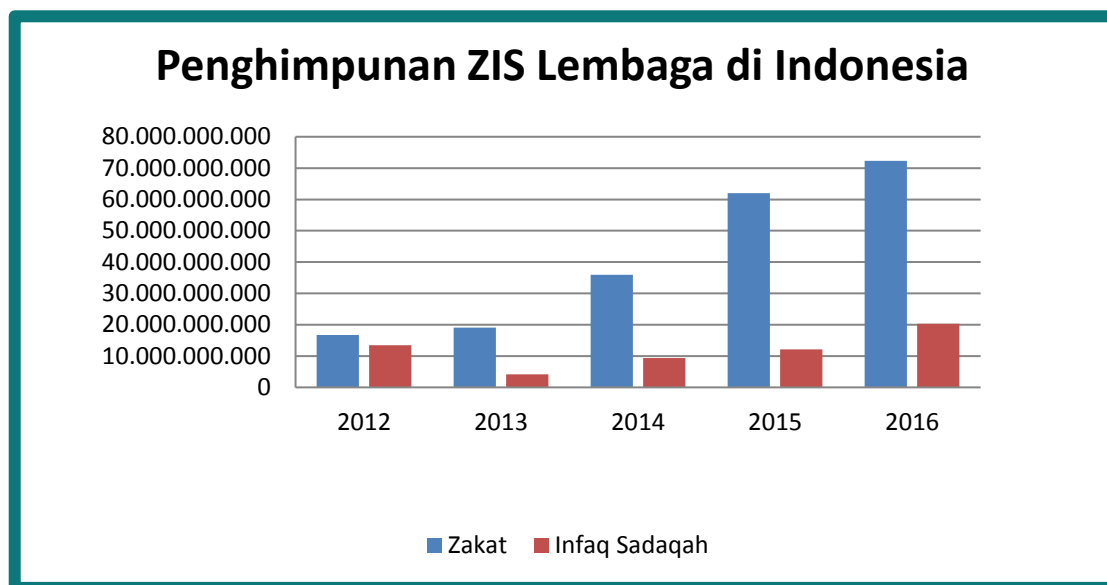
Tabel 3.2 Penghimpunan ZIS Lembaga di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Zakat	16.771.638.926	19.091.201.735	35.916.501.176	61.987.632.803	72.354.281.978
Infaq Sedekah	13.495.855.415	4.126.077.822	9.382.342.129	12.101.996.858	20.312.579.146
TOTAL	30.267.494.341	23.217.279.557	45.298.843.305	74.089.629.661	92.666.861.124

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Berbeda dengan Tabel 3.1 yang menunjukkan penghimpunan ZIS perorangan, Tabel 3.2 menunjukkan penghimpunan ZIS lembaga di Indonesia per Agustus 2016. Penghimpunan zakat lembaga yang terdata di SIMBA dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 55,58 miliar atau 331,41 persen. Untuk dana infaq sedekah lembaga, jumlah dari tahun 2012 hingga 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 6,82 miliar atau 50,51 persen.



Gambar 3.2 Total Penghimpunan ZIS Lembaga di Indonesia

Sedangkan untuk total penghimpunan ZIS lembaga pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 62,4 miliar atau 206,16 persen. Selain itu, Gambar 3.2 juga menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS lembaga dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Penurunan sebesar Rp 7,05 miliar atau 23,29 persen terjadi di tahun 2013. Namun, penurunan ini langsung diikuti lonjakan penghimpunan di tahun berikutnya hingga mencapai Rp 22 miliar atau 95,11 persen.

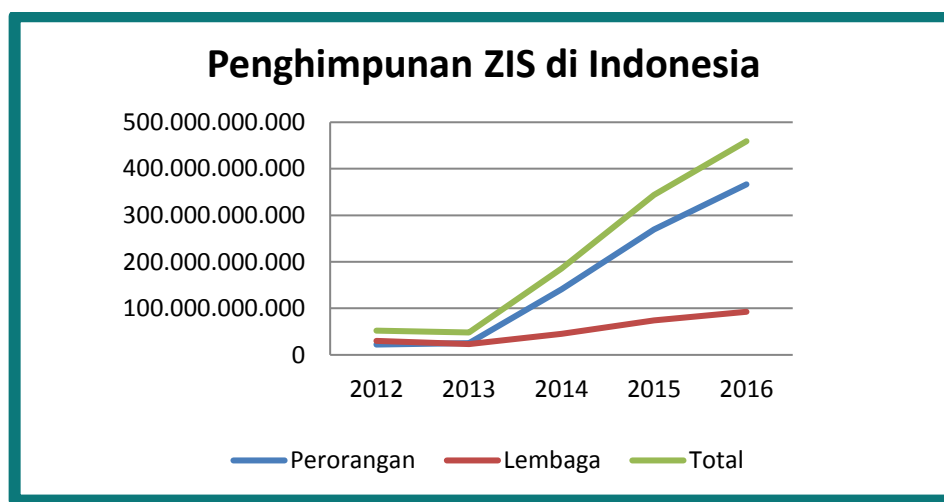
Tren yang meningkat pada penghimpunan ZIS lembaga ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya partisipasi lembaga atau perusahaan untuk berzakat melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya sosialisasi terkait kewajiban lembaga untuk membayar zakat. Dari penjelasan tersebut, dapat diproyeksikan bahwa penghimpunan zakat, infaq dan sedekah lembaga pada tahun 2017 juga akan terus meningkat sesuai dengan tren peningkatan penghimpunan zakat lembaga pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Penghimpunan ZIS di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Perorangan	22.186.801.085	24.955.456.166	140.585.373.579	269.884.547.435	366.505.392.158
Lembaga	30.267.494.341	23.217.279.557	45.298.843.305	74.089.629.661	92.666.861.124
TOTAL	52.454.295.426	48.172.735.723	185.884.216.884	343.974.177.096	459.172.253.282

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016



Gambar 3.3 Penghimpunan ZIS di Indonesia

Terhitung sejak SIMBA diluncurkan, penghimpunan ZIS baik dari perorangan maupun lembaga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Tabel 3.3, total dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 459,17 miliar, meningkat 33,49 persen dari tahun 2015. Peningkatan signifikan juga ditunjukkan pada tahun 2014 yaitu naik sebesar Rp 137,71 miliar atau 285,87 persen dari tahun 2013. Jika dilihat dari Gambar 3.3, penghimpunan ZIS perorangan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan ZIS lembaga. Hal

ini menunjukkan bahwa realitanya, pembayaran zakat secara personal masih mendominasi dibandingkan secara lembaga/institusi. Padahal, potensi zakat yang berasal dari perusahaan dan lembaga jauh melebihi potensi zakat personal/rumah tangga (Firdaus *et al*, 2012). Data ini mengindikasikan bahwa perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran dari lembaga/institusi untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ resmi.

Secara umum, gambaran ini menunjukkan pertumbuhan penghimpunan ZIS yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga diprediksikan bahwa total penghimpunan ZIS pada tahun 2017 juga akan meningkat. Jika melihat tren yang ada, setidaknya terdapat tiga skenario yang mungkin terjadi yaitu skenario optimis, moderat dan pesimis. Skenario optimis diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan penghimpunan zakat di atas 30 persen. Hal ini mungkin terjadi karena pada tahun 2014, penghimpunan ZIS bahkan mencapai peningkatan sebesar 285,87 persen.

Skenario kedua yaitu skenario moderat dimana pertumbuhan penghimpunan zakat berada di antara 20-30 persen. Sedangkan pada skenario pesimis, pertumbuhan penghimpunan zakat yaitu di bawah 20 persen. Walaupun data historis yang berasal dari SIMBA dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif meningkat, namun pada tahun 2013, penghimpunan ZIS sempat mengalami penurunan sebesar 8,16 persen. Berdasarkan data tersebut, skenario pesimis mungkin saja terjadi.

Jika penghimpunan zakat pada tahun 2016 sebesar Rp 459,17 miliar, maka pada tahun 2017, total zakat yang bisa dihimpun yaitu lebih dari Rp 596,92 miliar pada skenario optimis; Rp 551 – 596 miliar pada skenario moderat; dan lebih kecil dari Rp 551 miliar pada skenario pesimis. Namun, angka ini hanya memproyeksikan penghimpunan zakat berdasarkan data riil penghimpunan zakat dari SIMBA sehingga angka penghimpunan zakat nasional ini juga akan meningkat seiring dengan peningkatan sistem pelaporan SIMBA dan partisipasi dari seluruh lembaga zakat di Indonesia.

Tabel 3.4 Distribusi Penghimpunan ZIS berdasarkan Provinsi*
(dalam Rupiah ; tahun 2012-2016)

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016**
1	Nangroe Aceh Darusalam	0	38.000.000	0	0	11.747.806.523
2	Sumatera Utara	0	0	0	4.276.588.772	7.796.701.114
3	Sumatera Barat	13.375.217.657	282.656.061	3.779.463.230	4.763.612.710	54.172.101.913
4	Riau	0	1.344.397.234	15.329.111.121	20.153.308.397	35.000.062.326
5	Jambi	0	1.377.896	0	1.074.222.824	10.876.748.382
6	Sumatera Selatan	1.075.090	968.521.184	1.376.396.718	3.399.710.074	7.478.550.509
7	Bengkulu	246.606.894	10.638.000	0	1.362.945.079	3.345.412.809
8	Lampung	0	0	0	0	3.830.402.596
9	Kepulauan Bangka Belitung	102.545.125	396.494.161	479.031.725	1.201.349.257	4.651.791.577
10	Kepulauan Riau	0	0	681.378.236	2.977.635.181	6.837.113.030
11	DKI Jakarta	20.425.401.575	27.808.201.876	117.539.397.851	192.060.269.506	130.982.048.323
12	Jawa Barat	12.719.419.542	5.986.259.562	18.613.000.264	45.208.416.664	71.711.838.686
13	Jawa Tengah	1.758.100	23.529.900	241.835.065	1.872.201.361	25.248.562.924
14	Yogyakarta	0	0	0	39.229.813	5.880.290.179
15	Jawa Timur	41.446.800	553.199.338	7.256.440.413	19.948.992.053	29.838.686.577
16	Banten	783.615.951	1.212.017.249	2.200.477.198	13.615.613.203	23.521.848.661
17	Bali	0	8.340.000	13.580.000	172.300.200	2.662.393.638
18	Nusa Tenggara Barat	0	300.000	0	1.350.000	23.215.571.724
19	Nusa Tenggara Timur	2.070.000	54.236.000	0	24.406.300	1.753.938.138
20	Kalimantan Barat	0	0	168.638.800	2.787.285.356	3.324.289.704
21	Kalimantan Tengah	0	167.405.650	260.840.000	73.428.000	71.186.700
22	Kalimantan Selatan	779.354.990	1.517.202.617	2.714.900.774	3.559.683.835	3.732.321.088
23	Kalimantan Timur	3.927.506.760	7.319.945.030	5.855.476.651	13.801.761.177	19.535.383.712
24	Kalimantan Utara	0	4.640.000	1.897.114.913	6.345.654.569	7.504.880.258
25	Sulawesi Utara	3.500.000	358.544.089	359.840.344	317.438.666	2.318.309.950
26	Sulawesi Tengah	0	0	66.684.147	16.308.000	4.302.430.254
27	Sulawesi Selatan	0	1.693.000	0	1.550.315.757	12.843.951.562
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	11.830.000
29	Gorontalo	44.776.942	52.670.838	342.158.095	3.346.787.342	8.745.951.173
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	101.784.353
31	Maluku	0	0	0	0	3.664.294.134
32	Maluku Utara	0	62.466.038	2.175.000	23.363.000	1.697.727.671
33	Papua	0	0	0	0	3.027.261.975
34	Papua Barat	0	0	0	0	860.000

*Sumber: Data BAZNAS (2016); *diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016; **diambil dari data update SIMBA BAZNAS sampai dengan November 2016*

Selain dari penghimpunan ZIS dari tahun 2012 sampai 2016, proyeksi penghimpunan zakat 2017 juga dapat dilihat dari distribusi penghimpunan ZIS berdasarkan provinsi. Dari Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan ZIS di berbagai provinsi masih sangat bervariasi. Secara nasional, provinsi DKI Jakarta adalah penyumbang dana zakat terbesar se-Indonesia pada tahun 2016 yaitu mencapai Rp 130,98 miliar, disusul oleh Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk beberapa daerah seperti Papua, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah masih menunjukkan jumlah penghimpunan ZIS yang belum maksimal (masih di bawah Rp 100

juta). Kesenjangan jumlah penghimpunan ZIS di berbagai daerah ini menunjukkan adanya sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi dan berkumpul di kota-kota besar. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya hal ini. Pertama, belum optimalnya penggunaan SIMBA sehingga beberapa provinsi di Indonesia masih belum memasukkan seluruh data riil penghimpunan zakatnya. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia untuk memaksimalkan penghimpunan zakat terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketiga, belum adanya standarisasi pengelolaan zakat nasional yang benar-benar dapat diaplikasikan di BAZNAS daerah maupun lembaga zakat daerah.

3.4 Proyeksi Penyaluran Zakat 2017

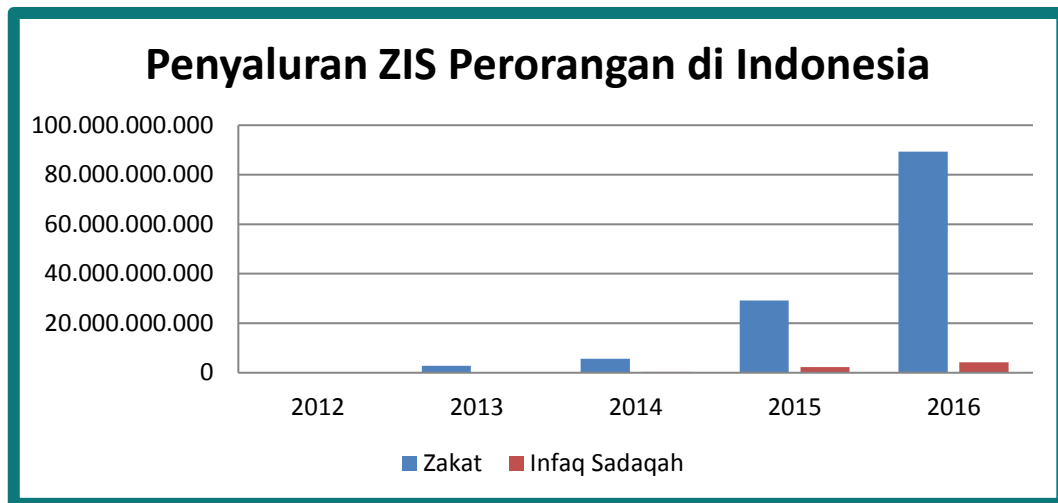
Data penyaluran zakat dapat dibagi menjadi penyaluran zakat perorangan, zakat kelompok, total penyaluran zakat, dan distribusi penyaluran zakat per provinsi di Indonesia. Per November 2016, BAZNAS melalui IT SIMBA telah menerima data pelaporan penyaluran zakat sebagaimana yang ditampilkan oleh Tabel 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 serta Gambar 3.4, 3.5, dan 3.6.

Tabel 3.5 Penyaluran ZIS Perorangan di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Zakat	232.403.000	2.746.157.341	5.609.690.003	29.126.463.635	89.313.759.040
Infak Sedekah	1.500.000	56.500.000	312.690.000	2.310.169.558	4.238.166.910
TOTAL	233.903.000	2.802.657.341	5.922.380.003	31.436.633.193	93.551.925.950

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016



Gambar 3.4 Penyaluran ZIS Perorangan di Indonesia

Tabel 3.5 menunjukkan penyaluran ZIS perorangan di Indonesia per Agustus 2016. Penyaluran zakat yang diberikan perorangan yang terdata di SIMBA dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 89,08 miliar atau 38.330 persen. Untuk penyaluran dana infaq sedekah perorangan, jumlah dari tahun 2012 hingga 2016 juga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp

4.24 miliar atau 282.444 persen. Sedangkan untuk total penyaluran ZIS perorangan mengalami peningkatan sebesar Rp 93,318 miliar atau 39.896 persen. Tren peningkatan penyaluran ZIS perorangan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 juga ditunjukkan oleh Gambar 3.4. Peningkatan penyaluran ZIS perorangan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 1,098 persen.

Tabel 3.6 Penyaluran ZIS Kelompok di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Zakat	182.455.000	5.527.745.843	10.357.237.035	30.469.769.872	64.566.948.371
Infaq Sedekah	37.250.000	649.499.247	1.210.674.840	2.467.401.168	6.259.076.775
TOTAL	219.705.000	6.177.245.090	11.567.911.875	32.937.171.040	70.826.025.146

Sumber: Data BAZNAS (2016);

**diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016*



Gambar 3.5 Penyaluran ZIS Kelompok di Indonesia

Di sisi lain, Tabel 3.6 menunjukkan penyaluran dana ZIS melalui kelompok per Agustus 2016. Penyaluran zakat kelompok yang terdata di SIMBA dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 64,38 miliar atau 35.287 persen. Untuk penyaluran dana infaq sedekah kelompok, jumlah dari tahun 2012 hingga 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 6,22 miliar atau 16.702 persen. Sedangkan untuk

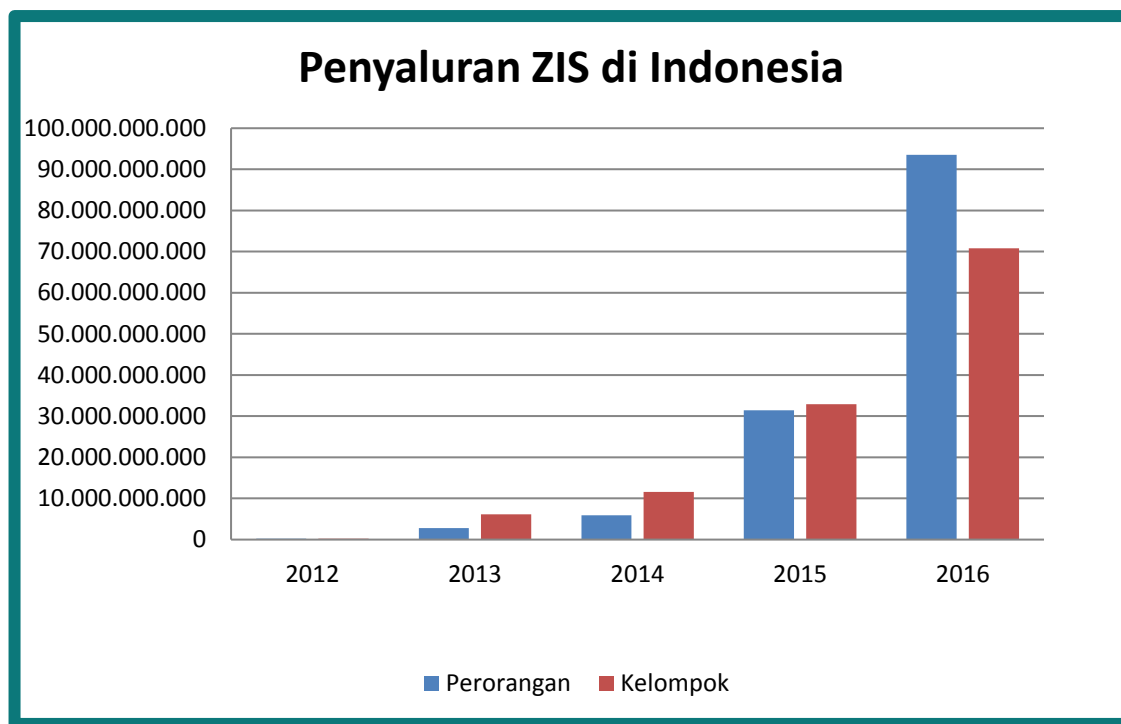
total penyaluran ZIS kelompok pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 70,6 miliar atau 32.136 persen. Selain itu, Gambar 3.5 juga menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS lembaga dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Lonjakan terbesar penyaluran ZIS kelompok terjadi pada tahun 2013 hingga mencapai Rp 5,96 miliar atau 27,20 persen.

Tabel 3.7 Total Penyaluran ZIS di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Perorangan	233.903.000	2.802.657.341	5.922.380.003	31.436.633.193	93.551.925.950
Kelompok	219.705.000	6.177.245.090	11.567.911.875	32.937.171.040	70.826.025.146
TOTAL	453.608.000	8.979.902.431	17.490.291.878	64.373.804.233	164.377.951.096

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016



Gambar 3.6 Penyaluran ZIS di Indonesia

Secara umum, penyaluran ZIS nasional menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Tabel 3.7, total dana ZIS yang disalurkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 164,38 miliar, meningkat 155,35 persen dari tahun 2015. Jika dilihat dari Gambar 3.6, penyaluran ZIS secara kelompok pada tahun 2012 sampai tahun 2015

relatif lebih tinggi dibandingkan penyaluran dana ZIS melalui kelompok. Sedangkan pada tahun 2016, penyaluran dana ZIS perorangan lebih tinggi dibandingkan penyaluran dana ZIS melalui kelompok. Namun, secara keseluruhan, total penyaluran dana ZIS selalu meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2012.

Dari gambaran peningkatan pertumbuhan penyaluran ZIS dari tahun ke tahun, dapat diprediksikan bahwa penyaluran dana ZIS pada tahun 2017 juga akan meningkat. Hal ini seiring dengan tren peningkatan pada penghimpunan ZIS dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dan prediksi adanya peningkatan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS di tahun 2017.

Pada proyeksi penghimpunan ZIS tahun 2017, terdapat tiga skenario yang mungkin terjadi yaitu skenario optimis, moderat, dan pesimis. Sementara itu, jika dilihat dari sisi penyalurannya, dapat diprediksikan

bahwa penyaluran dana ZIS pada tahun 2017 dapat mencapai lebih dari Rp 213,69 miliar pada skenario optimis; berada antara Rp 197,26 – 213,6 miliar pada skenario moderat; dan kurang dari Rp 197,26 miliar pada skenario pesimis. Sama seperti proyeksi penghimpunan ZIS, skenario angka ini hanya memproyeksikan penyaluran zakat berdasarkan data riil penyaluran zakat dari SIMBA di tahun 2016 sehingga angka penyaluran zakat nasional ini juga akan meningkat seiring dengan peningkatan sistem pelaporan SIMBA dan partisipasi dari seluruh lembaga zakat di Indonesia.

Tabel 3.8 Distribusi Penyaluran ZIS berdasarkan Provinsi* (dalam Rupiah; tahun 2012-2016)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016*
Nangroe Aceh Darusalam	0	0	0	0	17.276.901.507
Sumatera Utara	0	20.000	500.000	1.969.425.000	2.275.575.009
Sumatera Barat	79.155.000	73.250.000		376.160.000	34.754.260.109
Riau	0	1.655.890.000	1.915.335.000	6.544.690.000	22.000.835.022
Jambi	0	0	0	0	7.516.263.000
Sumatera Selatan	0	43.198.000	939.537.600	2.078.453.609	4.705.827.170
Bengkulu	0	0	0	0	1.233.510.000
Lampung	0	0	0	0	1.237.692.000
Kepulauan Bangka Belitung	49.720.000	22.170.000	64.965.000	583.009.000	2.105.964.640
Kepulauan Riau	0	0	418.033.000	2.925.649.000	3.457.129.496
DKI Jakarta	0	1.800.003	0	12.785.970.764	33.107.843.216

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016*
Jawa Barat	0	804.386.338	2.016.465.964	4.276.855.576	27.260.079.479
Jawa Tengah	0	0	0	45.000.000	5.345.435.700
Yogyakarta	0	0	0	0	1.479.108.900
Jawa Timur	0	0	1.957.007.174	14.060.695.936	15.061.675.715
Banten	500.000	4.799.392.090	8.003.673.640	8.643.194.031	11.111.784.322
Bali	0	500.000	5.800.000	70.600.000	1.905.698.955
Nusa Tenggara Barat	0	400.000	0	0	13.039.147.759
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	929.017.970
Kalimantan Barat	0	0	600.000	113.050.000	867.000
Kalimantan Tengah	0	44.400.000	9.470.000	16.900.000	80.950.000
Kalimantan Selatan	126.950.00 0	48.200.000	1.538.798.000	1.787.709.000	2.338.375.000
Kalimantan Timur	197.283.00 0	1.472.396.000	558.206.500	4.039.194.792	10.349.623.038
Kalimantan Utara	0	0	2.500.000	3.773.547.525	4.490.430.297
Sulawesi Utara	0	0	23.900.000	0	1.810.588.434
Sulawesi Tengah	0	0	35.500.000	0	477.671.500
Sulawesi Selatan	0	0	0	283.700.000	1.947.146.231
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0	0	0	6.668.081.590
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
Maluku	0	0	0	0	1.070.171.541
Maluku Utara	0	13.900.000	0	0	1.361.846.288
Papua	0	0	0	0	1.094.182.000
Papua Barat	0	0	0	0	0

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Selain data penyaluran zakat 2017, dapat dilihat juga distribusi penyaluran ZIS berdasarkan provinsi. Dari Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa penyaluran ZIS nasional tertinggi pada tahun 2016 yaitu diraih oleh provinsi Sumatera Barat, dengan total dana sebesar Rp 34,75 miliar. Provinsi lain yang juga memiliki dana penyaluran ZIS yang cukup tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, dan Nangroe Aceh Darussalam. Sedangkan untuk beberapa daerah seperti Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menunjukkan jumlah penyaluran ZIS sebesar Rp 0 (berdasarkan data input riil SIMBA). Kesenjangan jumlah penyaluran ZIS

di berbagai daerah ini menunjukkan adanya sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi dan berkumpul di kota-kota besar. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya hal ini. Pertama, belum optimalnya penggunaan SIMBA sehingga beberapa provinsi di Indonesia masih belum memasukkan seluruh data riil penyaluran zakatnya. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia untuk memaksimalkan penghimpunan zakat terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketiga, belum adanya standarisasi pengelolaan zakat nasional yang benar-benar dapat diaplikasikan di BAZNAS daerah maupun lembaga zakat daerah.

3.5 Proyeksi *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Selain data penghimpunan dan penyaluran ZIS yang telah dijelaskan sebelumnya, hal penting lainnya yang perlu dianalisis adalah rasio efektivitas penyerapan dana zakatnya atau disebut *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini dapat mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan (Zakat Core Principles, 2015). ACR ini dinyatakan dalam persentase yang dapat dibagi ke dalam lima kategori, yaitu:

1. *Highly effective* (jika $ACR \geq 90$ persen)
2. *Effective* (jika ACR mencapai 70 – 89 persen)
3. *Fairly Effective* (jika ACR mencapai 50 – 69 persen)
4. *Below Expectation* (jika ACR mencapai 20 – 49 persen)
5. *Ineffective* (jika $ACR < 20$ persen)

Nilai ACR berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Allocation to Collection Ratio (ACR) berdasarkan Provinsi di tahun 2016

Provinsi	Penghimpunan (Rp)	Penyaluran (Rp)	ACR (%)	Keterangan
Nangroe Aceh Darusalam	11.747.806.523	17.276.901.507	147,06%	<i>Highly Effective</i>
Sumatera Utara	7.796.701.114	2.275.575.009	29,19%	<i>Below Expectation</i>
Sumatera Barat	54.172.101.913	34.754.260.109	64,16%	<i>Fairly Effective</i>
Riau	35.000.062.326	22.000.835.022	62,86%	<i>Fairly Effective</i>
Jambi	10.876.748.382	7.516.263.000	69,10%	<i>Fairly Effective</i>
Sumatera Selatan	7.478.550.509	4.705.827.170	62,92%	<i>Fairly Effective</i>
Bengkulu	3.345.412.809	1.233.510.000	36,87%	<i>Below Expectation</i>
Lampung	3.830.402.596	1.237.692.000	32,31%	<i>Below Expectation</i>
Kepulauan Bangka Belitung	4.651.791.577	2.105.964.640	45,27%	<i>Below Expectation</i>
Kepulauan Riau	6.837.113.030	3.457.129.496	50,56%	<i>Fairly Effective</i>
DKI Jakarta	130.982.048.323	33.107.843.216	25,28%	<i>Below Expectation</i>
Jawa Barat	71.711.838.686	27.260.079.479	38,01%	<i>Below Expectation</i>
Jawa Tengah	25.248.562.924	5.345.435.700	21,17%	<i>Below Expectation</i>
Yogyakarta	5.880.290.179	1.479.108.900	25,15%	<i>Below Expectation</i>
Jawa Timur	29.838.686.577	15.061.675.715	50,48%	<i>Fairly Effective</i>
Banten	23.521.848.661	11.111.784.322	47,24%	<i>Below Expectation</i>
Bali	2.662.393.638	1.905.698.955	71,58%	<i>Effective</i>
Nusa Tenggara Barat	23.215.571.724	13.039.147.759	56,17%	<i>Fairly Effective</i>
Nusa Tenggara Timur	1.753.938.138	929.017.970	52,97%	<i>Fairly Effective</i>
Kalimantan Barat	3.324.289.704	867.000	0,03%	<i>Ineffective</i>
Kalimantan Tengah	71.186.700	80.950.000	113,72%	<i>Highly Effective</i>
Kalimantan Selatan	3.732.321.088	2.338.375.000	62,65%	<i>Fairly Effective</i>
Kalimantan Timur	19.535.383.712	10.349.623.038	52,98%	<i>Fairly Effective</i>
Kalimantan Utara	7.504.880.258	4.490.430.297	59,83%	<i>Fairly Effective</i>
Sulawesi Utara	2.318.309.950	1.810.588.434	78,10%	<i>Effective</i>
Sulawesi Tengah	4.302.430.254	477.671.500	11,10%	<i>Ineffective</i>
Sulawesi Selatan	12.843.951.562	1.947.146.231	15,16%	<i>Ineffective</i>
Sulawesi Tenggara	11.830.000	0	0,00%	<i>Ineffective</i>
Gorontalo	8.745.951.173	6.668.081.590	76,24%	<i>Effective</i>

Sulawesi Barat	101.784.353	0	0,00%	<i>Ineffective</i>
Maluku	3.664.294.134	1.070.171.541	29,21%	<i>Below Expectation</i>
Maluku Utara	1.697.727.671	1.361.846.288	80,22%	<i>Effective</i>
Papua	3.027.261.975	1.094.182.000	36,14%	<i>Below Expectation</i>
Papua Barat	860.000	0	0,00%	<i>Ineffective</i>

Sumber: Data BAZNAS (2016)

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat dua provinsi dengan kategori *Highly Effective*, empat provinsi dengan kategori *Effective*, sebelas provinsi dengan kategori *Fairly Effective*, sebelas provinsi dengan kategori *Below Expectation*, dan enam provinsi dengan kategori *Ineffective*. Sedangkan total ACR seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan angka 45 persen atau kategori *Below Expectation*. Kategori *Below Expectation* ini menunjukkan bahwa total dana zakat yang disalurkan masih lebih sedikit dibandingkan dana zakat yang dihimpun.

Rendahnya nilai efektivitas penyerapan atau nilai ACR ini mengindikasikan adanya pengelolaan zakat yang belum efektif dilakukan oleh lembaga zakat. Hal ini dapat juga disebabkan oleh kurang lengkapnya

data pelaporan yang terhimpun di dalam SIMBA sehingga belum merepresentasikan keseluruhan data yang terdapat di seluruh lembaga zakat yang tersebar di Indonesia. Belum optimalnya data pelaporan SIMBA ini dapat dijadikan evaluasi ke depannya agar setiap lembaga zakat resmi dan BAZNAS di seluruh daerah dapat mengoptimalkan penggunaan SIMBA. Jadi, ke depannya, dapat dilihat data riil penghimpunan dan penyaluran zakat di seluruh Indonesia sehingga nilai ACR yang didapat juga dapat memotret efektivitas penyerapan zakat di Indonesia. Upaya penggunaan data riil yang berasal dari SIMBA sebagai acuan proyeksi ini merupakan sebuah langkah awal yang tepat dan strategis untuk dapat memprediksikan pengelolaan zakat nasional ke depannya secara lebih akurat.

3.6 Proyeksi Pertumbuhan *Muzakki*

Tabel 3.10 Total *Muzakki* di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Perorangan	700	33.492	28.033	56.837	119.332
Lembaga	520	3.396	2.143	3.066	7.568
TOTAL	1.220	36.888	30.176	59.903	126.900

Sumber: Data BAZNAS (2016); *diambil dari data update SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Tabel 3.10 menunjukkan jumlah *muzakki* di Indonesia yang terdata di SIMBA dari tahun 2012 hingga Agustus 2016. Jumlah *muzakki* tersebut terdiri dari *muzakki* perorangan dan lembaga. Secara umum, terdapat peningkatan jumlah *muzakki* yang terdata di SIMBA. Kenaikan drastis terutama terlihat pada tahun 2013 dimana jumlah total *muzakki* lembaga dan perorangan mengalami peningkatan sekitar 35 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2014 jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan hingga menjadi sekitar 30 ribu *muzakki* yang terdiri dari *muzakki* perorangan dan lembaga. Tahun berikutnya, total *muzakki* kembali mengalami peningkatan hampir 100 persen, dan bahkan dari tahun 2015 hingga Agustus 2016 peningkatan yang terjadi lebih dari 100 persen.

Setidaknya terdapat dua kemungkinan terjadinya peningkatan yang signifikan di beberapa tahun tersebut, khususnya tahun 2013, 2015 dan 2016. Pertama, penggunaan SIMBA masih jauh dari optimal pada tahun 2012 sehingga tidak seluruh *muzakki* terdata di tahun tersebut. Penurunan jumlah *muzakki* pada tahun 2014 juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya hal teknis terkait dengan sistem informasi buatan BAZNAS tersebut. Sementara itu, di samping penggunaan SIMBA yang semakin baik, peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2015 dan 2016 bisa terjadi karena meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS dengan adanya kepemimpinan baru yang sudah berjalan efektif sejak semester kedua tahun 2015. Tingginya ekspektasi ini kemudian mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS.



Gambar 3.7 Total Muzakki di Indonesia

Gambar 3.7 memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah *muzakki* secara umum lebih dominan dipengaruhi oleh *muzakki* perorangan. Jumlah *muzakki* perorangan terlihat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014 dimana terdapat sedikit penurunan. Sementara itu, jumlah *muzakki* lembaga terlihat tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Peningkatan yang cukup terlihat berada di tahun 2016. Di samping kemungkinan pendataan jumlah *muzakki* di SIMBA baru cukup optimal di tahun 2016, kemungkinan tidak banyaknya pertumbuhan *muzakki* lembaga ini di antaranya adalah kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat bagi perusahaan atau badan usaha belum sebesar kesadaran membayar zakat bagi individu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah *muzakki* yang terjadi tidak cukup signifikan.

Tabel 3.11 Distribusi Muzakki berdasarkan Provinsi* (tahun 2012-2016)

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016*
1	Nangroe Aceh Darusalam	0	0	0	0	1.032
2	Sumatera Utara	0	0	0	1.824	2.403
3	Sumatera Barat	62	973	446	737	4.134
4	Riau	133	219	92	6.566	8.755
5	Jambi	0	0	2	2.628	3.533
6	Sumatera Selatan	0	376	3.015	1.466	4.945

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016*
7	Bengkulu	7	180	0	69	834
8	Lampung	0	0	0	0	308
9	Kepulauan Bangka Belitung	40	122	119	132	2.216
10	Kepulauan Riau	0	0	180	252	2.681
11	DKI Jakarta	6	21.663	9.762	13.531	11.558
12	Jawa Barat	51	3.886	1.557	4.320	20.973
13	Jawa Tengah	223	199	179	0	7.120
14	Yogyakarta	0	12	1.212	2.773	4.729
15	Jawa Timur	83	2.818	4.866	10.979	16.217
16	Banten	324	2.956	7.467	5.439	2.696
17	Bali	0	13	10	23	739
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	10.541
19	Nusa Tenggara Timur	8	9	0	0	352
20	Kalimantan Barat	0	20	0	1.136	959
21	Kalimantan Tengah	0	339	99	57	36
22	Kalimantan Selatan	36	693	199	550	808
23	Kalimantan Timur	21	1.909	667	2.102	5.209
24	Kalimantan Utara	0	0	0	586	4.866
25	Sulawesi Utara	0	192	117	583	640
26	Sulawesi Tengah	0	0	184	5	1.518
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	1.265	4.433
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	13
29	Gorontalo	226	0	0	2.675	1.314
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	617
31	Maluku	0	0	0	0	214
32	Maluku Utara	0	309	3	205	111
33	Papua	0	0	0	0	391
34	Papua Barat	0	0	0	0	5

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Tabel 3.11 menunjukkan jumlah *muzakki* di setiap provinsi sejak tahun 2012 hingga Agustus 2016. Pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2015, terdapat beberapa provinsi yang masih memiliki 0 (nol) *muzakki*. Hal ini tidak lantas berarti pada provinsi tersebut tidak ada *muzakki*. Kemungkinan terjadinya hal tersebut di antaranya karena penggunaan SIMBA yang belum berjalan di provinsi tersebut. Akibatnya, para *muzakki* di provinsi-provinsi tersebut tidak terdata.

Melihat pola yang ada pada tabel dan gambar di atas, pada tahun 2017 diproyeksikan bahwa jumlah *muzakki* akan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi, dengan semakin optimalnya penggunaan SIMBA di seluruh provinsi di Indonesia, pertumbuhan jumlah *muzakki* di Indonesia dapat semakin terpotret dengan lebih baik, dengan kata lain jumlah *muzakki* yang tidak terdata menjadi dapat diminimalisasi. Dengan demikian, jumlah *muzakki* pada tahun 2017 akan lebih tinggi lagi.

3.7 Proyeksi Distribusi *Mustahik*

Tabel 3.12 Total *Mustahik* di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Perorangan	428	20.557	9.487	42.270	104.145
Kelompok	25	2.218	3.291	3.332	5.772
TOTAL	453	22775	12778	45602	109917

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data update SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Jumlah *mustahik* di Indonesia pada tahun 2012 sampai Agustus 2016 yang terdata di SIMBA BAZNAS ditampilkan pada Tabel 3.12 Seperti halnya jumlah *muzakki*, jumlah *mustahik* juga terlihat meningkat drastis di tahun 2013. Pola yang serupa juga terjadi di tahun-tahun berikutnya, yakni terdapat penurunan pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali di tahun 2015 dan juga sampai Agustus 2016.

Kemungkinan terjadinya pola pertumbuhan jumlah *mustahik* yang serupa dengan pola pertumbuhan jumlah *muzakki* ini juga mengindikasikan bahwa pada tahun 2012, SIMBA masih sangat terbatas penggunaannya. Dengan pola yang sama pula, pada tahun 2014 mungkin terdapat kendala teknis dalam pendataan jumlah *mustahik*. Peningkatan yang pesat di dua tahun berikutnya, disamping karena semakin baiknya pendataan SIMBA BAZNAS, juga dapat dipengaruhi dengan semakin tingginya penghimpunan dana zakat sehingga semakin banyak *mustahik* yang dapat dilayani oleh BAZNAS.



Gambar 3.8 Total Mustahik di Indonesia

Gambar 3.8 menampilkan bahwa peningkatan jumlah *mustahik* di Indonesia secara umum merupakan *mustahik* perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa program penyaluran zakat lebih banyak menjadikan *mustahik* perorangan sebagai target penerima manfaatnya. Seperti halnya pada pola pertumbuhan jumlah *muzakki*, peningkatan *mustahik*

kelompok yang terlihat lebih tinggi daripada tahun-tahun lainnya terjadi pada tahun 2016. Hal ini mungkin dapat terjadi karena semakin banyak program penyaluran yang menysasar *mustahik* kelompok. Kemungkinan lainnya, dana zakat yang ada semakin memungkinkan penyaluran zakat untuk *mustahik* secara berkelompok.

Tabel 3.13 Distribusi Mustahik berdasarkan Provinsi* (tahun 2012-2016)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016*
Nangroe Aceh Darusalam	0	0	0	0	2.976
Sumatera Utara	0	0	0	2.024	3.992
Sumatera Barat	226	988	0	1.392	7.812
Riau	0	164	199	8.024	17.557
Jambi	0	0	0	163	7.603
Sumatera Selatan	0	87	171	687	2.675
Bengkulu	0	0	0	1.037	1.044
Lampung	0	0	0	0	303
Kepulauan Bangka Belitung	168	10	70	1.245	1.388
Kepulauan Riau	0	2	79	492	1.063
DKI Jakarta	35	2.165	1.511	1.611	286
Jawa Barat	0	7.643	4.711	3.699	8.338
Jawa Tengah	0	1.283	0	17	2.568
Yogyakarta	0	0	0	339	503
Jawa Timur	17	274	2.949	11.480	13.177
Banten	0	4.117	2.168	1.366	4.178
Bali	0	72	52	103	2.049
Nusa Tenggara Barat	1	4.294	0	0	11.067
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	358
Kalimantan Barat	0	0	0	274	696
Kalimantan Tengah	0	889	102	6	101
Kalimantan Selatan	6	132	325	4.443	3.488
Kalimantan Timur	0	413	305	1.961	4.474
Kalimantan Utara	0	93	0	26	897
Sulawesi Utara	0	114	66	1.485	720
Sulawesi Tengah	0	0	70	16	185
Sulawesi Selatan	0	0	0	66	1.981
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0	0	3.646	7.614
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
Maluku	0	0	0	0	92
Maluku Utara	0	35	0	0	298
Papua	0	0	0	0	434
Papua Barat	0	0	0	0	0

Sumber: Data BAZNAS (2016);

*diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

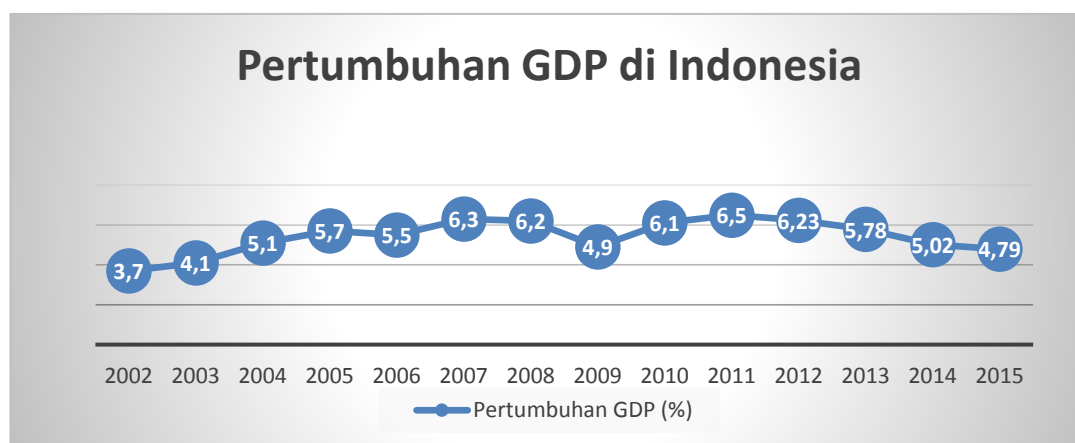
Tabel 3.13 menampilkan jumlah *mustahik* di setiap provinsi tahun 2012 sampai Agustus 2016. Berbeda dengan jumlah *muzakki* per provinsi, tabel ini menunjukkan bahwa pada beberapa provinsi masih terdapat jumlah *mustahik* sebanyak 0 (nol). Hal ini mungkin terjadi karena sampai bulan Agustus, data *mustahik* belum dimasukkan ke dalam SIMBA. Kemungkinan lainnya, program penyaluran di daerah-daerah tersebut masih belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan tabel dan gambar mengenai jumlah *mustahik* di Indonesia, dapat diproyeksikan pada tahun 2017 akan terdapat peningkatan jumlah *mustahik* di Indonesia. Selain penggunaan SIMBA yang semakin optimal dalam mencatat jumlah penerima manfaat, semakin tingginya penghimpunan juga dapat mendukung pertumbuhan jumlah *mustahik* yang dapat dilayani oleh BAZNAS. Koordinasi BAZNAS di seluruh daerah di Indonesia yang semakin optimal dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 juga dapat mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat di berbagai daerah, khususnya daerah-daerah terluar Indonesia, karena setiap daerah akan saling terhubung oleh BAZNAS.

3.8 Proyeksi Pertumbuhan Zakat



Gambar 3.9 Pertumbuhan Zakat di Indonesia (tahun 2002-2015)



Gambar 3.10 Pertumbuhan GDP di Indonesia (tahun 2002-2015)

Pertumbuhan zakat pada Gambar 3.9 menunjukkan bahwa perkembangan zakat di Indonesia selalu meningkat secara konsisten dari mulai tahun 2002 hingga tahun 2015. Data pertumbuhan zakat ini didapat dari laporan penghimpunan nasional yang masuk ke BAZNAS (bukan hanya

dari sistem IT SIMBA BAZNAS). Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: tingkat rasio penghimpunan dari tahun ke tahun dan rasio penyalurannya.

Pada tahun 2003, pertumbuhan lembaga zakat Indonesia langsung menyentuh angka

23 persen. Berturut-turut pada tahun 2004 mencapai angka 76 persen, 2005 naik hingga menyentuh angka 96 persen, 2006 sempat mengalami kenaikan 26 persen, 2007 menembus angka 98 persen, 2008 naik 24 persen, 2009 naik 30,43 persen, 2010 tumbuh 25 persen, 2011 tumbuh 15 persen, 2012 tumbuh 27 persen, 2013 tumbuh 22 persen, 2014 tumbuh 22 persen, dan 2015 tumbuh 21 persen. Dengan melihat tren pertumbuhan zakat yang konsisten dari tahun ke tahun hampir semua di atas 20 persen, maka pada tahun 2016 ini diprediksi pertumbuhan zakat akan berada diantara angka 20 – 25 persen dengan total target penghimpunan Rp 5 triliun. Pada tahun 2017, diprediksi akan terjadi pertumbuhan zakat yang signifikan, mengingat tahun 2017 tata kelola perzakatan nasional akan dapat dukungan penuh dari sisi kebijakan regulasi dan teknologi informasi.

Secara faktual, sejatinya pertumbuhan zakat ini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP, hal demikian dapat dilihat melalui perbandingan dari kedua gambar di atas (lihat Gambar 3.9 dan 3.10). Dapat digambarkan, rerata

tahunan pertumbuhan penghimpunan ZIS oleh OPZ resmi untuk periode 2002-2015 adalah 38,8 persen. Pertumbuhan itu jauh melampaui rerata tahunan pertumbuhan ekonomi nasional periode tersebut yang hanya 5,4 persen. Beberapa faktor potensial rerata tahunan penghimpunan zakat yang bisa melampaui rerata tahunan pertumbuhan ekonomi antaranya yaitu: (1) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui badan amil zakat resmi yang dibentuk dan/atau diakui pemerintah, (2) membaiknya sistem pelaporan ZIS secara nasional, dan (3) cepatnya pertumbuhan kelas menengah (tercepat di ASEAN).

Pertumbuhan zakat di masa yang akan datang sepertinya akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah. Optimisme pertumbuhan zakat ini berkaitan dengan prediksi dari PWC (2005), Citibank (2010), dan Mc Kinsey (2012) yang memproyeksikan Indonesia pada era 2030 – 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh hingga keempat di dunia. Oleh karena itu, jika proyeksi itu

benar, maka potensi zakat pada era tersebut akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Sikap optimisme ini juga berkaitan dengan prediksi beberapa pakar yang menyatakan bahwa pusat gravitasi geo-ekonomi sedikit demi sedikit sedang bergeser dari barat ke Asia. Prediksi ini didukung oleh fakta bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, laju pergeseran dari US dan Eropa ke Asia meningkat drastis (McKinsey Global Institute, 2012).



TANTANGAN DAN PELUANG ZAKAT 2017

4.1 Pendahuluan

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat sangat besar hingga mencapai Rp 286 triliun pada tahun 2015, jika diekstrapolasikan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun-tahun sesudahnya. Dimana secara realita, pertumbuhan penghimpunan zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat resmi yang dimiliki pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah untuk periode 2002-2015 adalah lebih dari 23 persen, jauh melampaui rerata pertumbuhan ekonomi nasional periode tersebut yang kurang dari 6 persen.

Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tingginya pertumbuhan tersebut, yaitu: (1) meningkatnya kesadaran umat untuk membayar dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga-lembaga amil zakat resmi yang dimiliki pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah, (2) meningkatnya empati untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang terkena musibah, (3) membaiknya pelaporan zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat resmi yang dimiliki pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah, dan (4) cepatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, tercepat diantara negara-negara anggota ASEAN. Realita pertumbuhan zakat ini diprediksi akan terus berlanjut mengingat ada benang merah antara zakat dan masalah-masalah sosial dan kemiskinan di Indonesia.

4.2 Masalah Sosial dan Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Perekonomian domestik Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif dalam hal pemerataan kemakmuran. Indikasi ini tampak dalam Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, bahwa Gini Ratio Indonesia mencapai angka 0,397. Artinya, saat ini, satu persen kelompok orang terkaya menguasai 39,7 persen aset nasional. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu.

Hal yang juga memperhatikan adalah angka kemiskinan versi BPS dalam Laporan Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 yang mencapai 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Walaupun angka ini turun 0,36 persen dari tahun lalu, namun setidaknya masih terdapat 28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar Rp 354.386,00 per kapita per bulan. Angka kemiskinan dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang setara dengan USD 1,9 per kapita per hari.

Sementara itu, dalam laporan United Nation Development Programme (UNDP) (2015), nilai Indonesia untuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) sebesar 0,684. Hal ini menandakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara kategori menengah dalam pembangunan manusia. Secara umum, berdasarkan partisipasi pengukuran sejak tahun 1980, nilai Indonesia relatif mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 44,3 persen per tahun. Namun, angka tersebut masih menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 188 negara anggota PBB, posisi yang setara dengan Gabon, salah satu negara miskin di Afrika.

Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak bencana alam, baik yang bersifat alamiah seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, maupun bencana alam yang bersifat kesalahan pembangunan seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Kondisi rawan bencana ini memberikan dampak yang signifikan dalam penciptaan kondisi kemiskinan baru

sebagai dampak dari bencana yang terjadi, seperti kehilangan aset, sumber pekerjaan, maupun akses terhadap jaminan sosial yang disediakan oleh negara.

Dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial dan pengurangan kemiskinan ini, pemerintah melalui APBN menekankan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan) untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Mulai APBN 2016 ini juga terdapat sembilan hal baru. *Pertama*, pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. *Kedua*, percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. *Ketiga*, percepatan pengurangan kesenjangan antara lain melalui perluasan jangkauan Program Keluarga Harapan. *Keempat*, menjaga kesejahteraan aparatur negara. *Kelima*, alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran kementerian/lembaga (Belanja K/L). *Keenam*, meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. *Ketujuh*, meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional. *Kedelapan*, meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6 persen, di luar transfer ke daerah sesuai *Road Map* Dana Desa 2015-2019. *Kesembilan*, mempertajam alokasi penyertaan modal nasional (PMN) melalui peningkatan peran BUMN dan penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur (listrik, jalan, bandara dan pelabuhan).

Secara spesifik, agenda pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam tugas penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Sejak tahun 2014, Kementerian Sosial mencanangkan empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi peningkatan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (makanan) dan papan (rumah), peningkatan kapasitas melalui pemberian pelatihan dan keterampilan, dan

pendampingan sosial dalam rangka memberikan bimbingan kepada *beneficiaries* serta mempercepat proses pemberdayaan.

Secara praktikal, strategi penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh pemerintah tersebut diimplementasikan dalam sejumlah program, di antaranya: Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Raskin, dan Kredit Usaha Rakyat.

4.3 Pembangunan Keuangan Inklusif di Indonesia

Di dalam *Roadmap* Keuangan Syariah Indonesia 2015-2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diungkapkan bahwa nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai luhur dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai dasar ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, akhlak yang melahirkan kesetiakawanan (*ukhuwah*), keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sedangkan nilai luhur bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat berke-Tuhanan Yang Maha Esa, adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan bersama.

Dalam Masterplan Arsitektur Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), yang dirilis oleh BAPPENAS, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam *Religious Financial Sector*. Keberadaan zakat dalam kerangka ini menjadi komplemen penyempurna yang tidak dimiliki oleh model keuangan konvensional. Penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Hadirnya karakteristik aktivitas ekonomi syariah yang berkualitas diharapkan memberikan implikasi positif bagi perekonomian, antara lain: akses sumberdaya ekonomi yang merata, dorongan implementasi konsep bagi hasil, harmonisasi sektor keuangan dan sektor riil, investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab, praktek ekonomi yang berhati-hati, dan pemenuhan prinsip syariah. Praktik dari semua ini muaranya adalah bagaimana tujuan pembangunan dan ekonomi syariah itu bisa terwujud yakni: mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Salah satu bentuk dukungan yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi syariah adalah melalui keuangan inklusif (*financial inclusion*). Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses

masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Untuk itu, muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, keuangan inklusif telah dibahas dalam forum G20, OECD, AFI, APEC dan ASEAN, dimana Indonesia berpartisipasi aktif di dalamnya. Sedangkan di tingkat nasional, komitmen pemerintah telah disampaikan Presiden RI dalam *Chairman Statement* pada ASEAN Summit 2011 dan komitmen untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi 6 pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

4.4 Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Inklusif di Indonesia

Geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan menandakan bahwa zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: (1) memoderasi kesenjangan sosial; (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan; (3) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan (4) mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Keempat peran tersebut akan dijabarkan secara terperinci sebagai berikut.

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta nontransaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada *mustahik* memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Pemberdayaan *mustahik* merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan membangkitkan ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana Rp 286 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam delapan *ashnaf* (kategori) *mustahik*. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

4.5 Prospek Pembangunan Zakat 2017

Dengan melihat prospek ke depan dan faktor-faktor pendukungnya, tahun 2016 dan 2017 bisa dikatakan sebagai momentum strategis dalam pembangunan zakat nasional. Paling tidak terdapat dua hal yang bisa dijabarkan. *Pertama*, tahun tersebut adalah tahun yang sangat penting dalam hal konsolidasi kelembagaan zakat dengan format baru, dimana BAZNAS memiliki kewenangan sebagai koordinator perzakatan nasional. *Kedua*, meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS, yang telah memiliki kepemimpinan baru yang sudah berjalan efektif sejak semester kedua tahun 2015. Publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap BAZNAS agar lembaga tersebut memiliki kinerja yang optimal dalam memimpin dunia perzakatan nasional sehingga baik penghimpunan maupun penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik.

Secara internasional, tahun 2016 dan 2017 juga diperkirakan menjadi momentum penguatan kerja sama zakat dunia. Hal ini ditandai dengan semakin mengkrystalnya hasil pembahasan dalam empat kali pertemuan IWG ZCP (*International Working Group on Zakat Core Principles*) sepanjang tahun 2014-2015 lalu. Dokumen ZCP yang telah disahkan pada tanggal 23-24 Mei 2016 di Istanbul, Turki ini bahkan telah menghasilkan dua dokumen *technical notes* turunannya, yaitu *Technical Notes on Risk Management for Zakat Institution* dan *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution*. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut diharapkan menjadi sumber referensi pengelolaan zakat dunia sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola sistem perzakatan dunia. Peran Indonesia tidak diragukan lagi, sangat penting dan krusial.

Dengan melihat kondisi di atas, terlihat bahwa tahun 2016 dan 2017 akan menjadi tahun yang akan lebih dinamis, progresif, dan menantang. Agar perjalanan pembangunan zakat nasional dan internasional berjalan selaras, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh BAZNAS sebagai penanggung jawab pengelolaan zakat nasional.

Pertama, konsolidasi kelembagaan yang tengah berjalan harus dapat dituntaskan dengan baik. Konsolidasi ini meliputi penyesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang baru, seperti penyesuaian persyaratan LAZ, pengisian

pos-pos pimpinan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyamaan frekuensi visi misi perzakatan nasional agar terinternalisasikan dengan baik oleh seluruh pegiat zakat nasional. Ini sangat penting agar BAZNAS daerah dan LAZ memahami dengan baik seluruh agenda dan kebijakan zakat nasional.

Kedua, perlunya penguatan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional agar kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan aktual zakat bisa direduksi. Dalam konteks ini, maka sosialisasi dan edukasi publik harus diperkuat dan dikembangkan secara masif, sistematis dan efektif. Termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas lain yang terkait, seperti OJK dan Bank Indonesia.

Dengan OJK, perlu dikembangkan strategi penghimpunan zakat institusi-institusi keuangan yang berada di bawah kendali OJK. Misalnya, bagaimana memunculkan kesadaran kolektif lembaga keuangan, baik perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal untuk menunaikan kewajiban zakat mereka melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Contoh kongkretnya antara lain yaitu upaya untuk menetapkan syarat saham-saham yang masuk kategori saham syariah melalui penerapan kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan. Jika hal ini diakomodasi dalam Peraturan OJK, maka dipastikan penghimpunan zakat akan meningkat.

Pada sisi penyaluran, upaya adaptasi terhadap dokumen ZCP disarankan untuk mulai dilakukan. Sebagai contoh, ketentuan tentang perhitungan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini penting sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Jika suatu lembaga nilai ACR-nya mencapai 90 persen, maka artinya 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil hanya menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, semakin rendah persentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaikinya.

Ketiga, rencana untuk mendirikan IIFSB (*Islamic Inclusive Financial Services Board*) pada tahun 2016 ini harus dikawal dengan baik. BAZNAS perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait dengan

upaya pendirian tersebut sehingga IIFSB dapat diluncurkan sesuai rencana awal. IIFSB inilah yang nantinya akan menjadi media penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara global.

Namun begitu, diprediksikan akan ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi lembaga-lembaga zakat di tahun 2017. *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, ada fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada *mustahik* yang mereka kenal, tanpa melalui lembaga zakat resmi. *Ketiga*, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Cepat Tanggap. (n.d.). *About us*. Diambil dari <https://act.id>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Dokumen Statistik BAZNAS 2016*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Gini Ratio Maret 2016, BPS Official News.
- Baitul Maal Hidayatullah. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://bmh.or.id>
- Baitul Maal Muamalat. (n.d.). *About us*. Diambil dari www.baitulmaalmuamalat.org
- Bank Dunia (2010) Survei Bank Dunia 2010
- Bank Indonesia (2011) Survei Neraca Rumah Tangga
- Beik, I. S. (2015). *Towards International Standardization of Zakat*. Conference Paper, November 2015.
- Beik, I.S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., Nazar, J. K. (2015). *Core Principles for Effective Zakat Supervision: Consultative Document*. Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.
- Citibank (2010) Citibank Annual Report 2010
- Dompot Dhuafa. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.dompetdhuafa.org>
- DPU Daarut Tauhiid. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://dpu-daaruttauhiid.org>
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* (Working Paper Series WP#1433-07). Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hartono. 2016. Mengungkap Tabir Zakat di Indonesia. Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/article/mengungkap-tabir-zakat-di-indonesia> pada 17 November 2016
- Indonesia Magnificence of Zakat. (2012). *Indonesia Zakat Development Report 2012*. Jakarta: IMZ.
- Inisiatif Zakat Indonesia. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://izi.or.id>
- Islamic Research and Training Institute. (2014). *Islamic Social Finance Report 2014*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, M. (2000). *Zakat Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, M. (2002). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kemenkeu (2014) Road Map Dana Desa 2015-2019
- Kinsey (2012) 2012 Kinsey Annual Report
- LAZ Al-Azhar. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.al-azhar.or.id>
- LazisMU. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.lazismu.org>
- Lazis NU. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.nucare.id>

- LMI Zakat. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://lmizakat.org>
- LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010). *Indonesia Economic Outlook 2010*. Jakarta : Grasindo.
- McKinsey Global Institute. (2012). *Urban world: Cities and the rise of the consuming class*.
- Murdaningsih, D. (2015). *Mengenal Trensains, Pondok Pesantren berbasis Sains*. Diambil dari www.khazanah.republika.co.id
- Pricewaterhouse Coopers. (2005). *PWC Annual Report 2005*. Diambil dari <http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/pwc-annualreport2005-full.pdf>.
- Pusat Zakat Umat. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://pzu.or.id>
- Ramon Magsaysay Award Foundation. (n.d.). *About The Ramon Magsaysay Award*. Diambil dari <http://www.rmaward.asia>
- Ramon Magsaysay Award Foundation. (n.d.). *Dompot Dhuafa*. Diambil dari <http://www.rmaward.asia>
- Rumah Zakat. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.rumahzakat.org>
- Rumah Zakat. (2015). *Laporan Tahunan 2014*. Diambil dari <http://www.rumahzakat.org>
- Trensains Lazismu. (n.d.). *Profil Singkat SMA Trensains: Pesantren Sains, Pertama di Dunia Islam*. Diambil dari <http://www.trensains.lazismu.org>
- United Nation Development Programme (UNDP). (2015).
- Yayasan Nurul Hayat. (n.d.). *Majelis Ta'lim Abang Becak – MATABACA*. Diambil dari <http://www.nurulhayat.org>
- Yayasan Nurul Hayat. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.nurulhayat.org>
- Yatim Mandiri. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://www.yatimmandiri.org>
- Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. (n.d.). *About us*. Diambil dari <http://ydsf.org>



Lampiran 1. Profil BAZNAS

Pendirian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011. BAZNAS berkedudukan di Gedung Arthaloa Kavling 2, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10220. Tujuan didirikannya BAZNAS yaitu untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam menjalankan kegiatannya.

Visi Misi BAZNAS

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.”

Misi :

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;

6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur;
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

Kebijakan Mutu

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik
3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam mengentaskan kemiskinan
4. Pengembangan BAZNAS Propinsi, Kabupaten/Kota, LAZ se Indonesia
5. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat nasional yang akurat dengan didukung oleh system teknologi informasi
6. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah dan profesional
7. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS

Tujuan Mutu

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia
2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional

3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN, dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ
7. Meningkatkan kerja sama antar lembaga nasional dan internasional
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri
9. Penyempurnaan Regulasi dan SOP
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi

Lampiran 2. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sesuai dengan UU No. 23/2011, BAZNAS menjadi koordinator dalam mengelola zakat tingkat nasional, termasuk mengkoordinir pengumpulan laporan secara berkala oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 berisi tentang Pedoman Pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang dalam merekomendasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memiliki izin resmi maupun tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan KMA No.333/2015 tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu LAZ Nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Saat ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 LAZNAS, 7 LAZ Provinsi dan 10 LAZ Kabupaten/Kota.

Adapun 16 LAZ Nasional (LAZNAS) terdiri dari LAZ Rumah Zakat, Dompet Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhid, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ IZI, Yatim Mandiri, Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Dasa Sosial Al Falah, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Baitul Maal Muamalat, LAZIS NU, LAZ Global Zakat, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Dewan Dakwah dan LAZ PZU (Persis).

Salah satu potensi penghimpunan dana zakat secara nasional diantaranya berasal dari LAZ tersebut. Sejauh ini, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ mengalami kenaikan. Misalnya, pada tahun 2010, LAZ Rumah Zakat, menghimpun dana sebesar Rp 135,081 miliar dan mengalami kenaikan hingga Rp 198,331 miliar pada tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014, LAZ Dompet Dhuafa Republika mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 195,75 miliar, LAZIS NU dari data laporan tahun 2013 berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 7,4 miliar, sedangkan LAZ PZU (Persis) mampu menghimpun dana zakat hingga Rp 1,082 miliar. Profil singkat mengenai LAZ nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakatnya ditunjukkan oleh Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Profil LAZ Resmi di Indonesia

No	Nama Lembaga	Rekomendasi	Alamat	Program
1	LAZ Rumah Zakat	No.234/BP/BAZNAS/VI/2015	Jl. Turangga No. 25 C Bandung. Call Center: 0804 100 1000 WA/SMS Center: 0815 7300 1555 Phone : 022-7332407 Fax: 022-7332478 Email: welcome@rumahzakat.org BBM Center: 5D4F850C Website : https://www.rumahzakat.org	1. Senyum Juara 2. Senyum Mandiri 3. Senyum Sehat 4. Senyum Lestari 5. Senyum Ramadhan 6. Superqurban
2	Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhid	No.096/BP/BAZNAS/II/2016; No.236/BP/BAZNAS/VII/2015 (provinsi)	Jl. Gegerkalong Girang No. 32 Bandung- Pesantren Daarut Tauhid Phone : 08510007002 Website : https://dpu-daaruttauhiid.org	1. Dakwah KU 2. Ikhtiar KU 3. Beasiswa KU 4. Peduli KU
3	Yayasan Baitul Maal Hidayatullah	No.237/BP/BAZNAS/VII/2015	Jl. H. Samali No. 79B Pejaten Barat, Pasar Minggu, South Jakarta, Indonesia 12510 Phone : 0217975770 Website : http://bmh.or.id	1. Dai Tangguh 2. Mandiri Teladan 3. Senyum Anak Indonesia 4. Siaga Bencana Nusantara
4	LAZ Nurul Hayat	004/HVR/SDP/BAZNAS/IV/2015	IKIP Gunung Anyar Housing B-48, Surabaya, Indonesia Phone 02318783344 Website : http://www.nurulhayat.org	1. Education 2. Orphans Economic Development 3. Dakwah Program Health Program

No	Nama Lembaga	Rekomendasi	Alamat	Program
5	LAZ Dompot Dhuafa Republika	No.339/BP/BAZNAS/X/2015	Philanthropy Building : Jl. Buncit Raya Barat No.14, South Jakarta 12540, Indonesia Phone : +62 21 7821292 Fax : +62 21 7821333 ZISWAF Office : Ciputat Indah Permai Office, Blok C 28-29 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat - 15419 South Tangerang, Banten, Indonesia Phone : +62 21 7416040 (Hunting) Fax : +62 21 7416070 Call Center : +62 21 7416050 Email : layandonatur@dompetdhuafa.org Website : https://www.dompetdhuafa.org	1. The Emergency Need 2. Economic aid 3. Health 4. Social Development 5. Orphans Education
6	LAZ IZI	005/HVR/SDP/BAZNAS/VI/2015	Jl. Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar East Jakarta, 13520 Phone : 021-8778603 E-mail : salam@izi.or.id Website : https://izi.or.id	1. IZI To Success 2. IZI To Smart 3. IZI To Fit 4. IZI To Iman 5. IZI To Help

No	Nama Lembaga	Rekomendasi	Alamat	Program
7	Yatim Mandiri	No.006/BP/BAZNAS/I/2016	Graha Yatim Mandiri, Jl. Raya Jambangan No. 135-137 Surabaya 60232 Phone. 08111343577 Website : http://www.yatimmandiri.org	1. Health 2. Education 3. Social humanity 4. Economic Empowerment
8	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah	No.007/BP/BAZNAS/I/2016	Gedung Sehati Lt. 3. Jl. Barata Jaya Gg XXII No. 20 Surabaya Phone. 02315053883 or 082230000909 Website : http://lmizakat.org	Program “Aksi Peduli” : 1. Peduli Dakwah 2. Peduli Pendidikan 3. Peduli Yatim 4. Peduli Kesehatan 5. Peduli Ekonomi Masyarakat 6. Peduli Kemanusiaan 7. Ramadhan Plus 8. Qurban Plus
9	Yayasan Dana Sosial Al-Falah	No.095/BP/BAZNAS/II/2016	Jl. Kertajaya 8C/17 Phone : (031)5056650 Website : http://ydsf.org	1. Education 2. Fatherless 3. Dakwah 4. Mosque 5. Humanity
10	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar	No.097/BP/BAZNAS/II/2016	Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru-South Jakarta Phone : 0217243933/7261233 Website : http://www.al-azhar.or.id	1. Education 2. Dakwah 3. Business 4. Social 5. Community

No	Nama Lembaga	Rekomendasi	Alamat	Program
11	Yayasan Baitul Maal Muamalat	No.107/BP/BAZNAS/II/2016	Mitra Matraman Office Blok A1 No. 27 Jl. Matraman Raya, East Jakarta 13150 Website : www.baitulmaalmuamalat.org	1. Economic Empowerment 2. Education 3. Social Humanity 4. Health
12	NU CARE - LAZIS NU	No.095/PH/BAZNAS/V/2016; 002/HVR/SDP/BAZNAS/V/2016	Gedung PBNU Lt 02 Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat Phone : (021) 3102913 Email : info@lazis.nu.or.id Website : http://www.nucare.id	1. Education 2. Health 3. Economy 4. Disaster Preparedness
13	LAZ Global Zakat	No.187/PH/BAZNAS/VII/2016; No.017/HVR/SDP/BAZNAS/VII/2016	Menara 165, 11 th Floor, Jl. TB. Simatupang, Kav. 1, Cilandak, South Jakarta, 12560 Phone : 02129406565 Website : https://act.id	1. Disaster and Social Mitigation 2. Disaster Emergency and Rellief Management (DERM) 3. Disaster Recovery Program (DRP) 4. Global Humanity Response 5. Social Development Program
14	LAZIS Muhammadiyah	218/PH/BAZNAS/VIII/2016; 020/HVR/SDP/BAZNS/VIII/2016	Jl. Menteng Raya 62, Central Jakarta 10340 Phone : 0213150400 Website : http://www.lazismu.org	1. Education 2. Economy 3. Social 4. Dakwah
15	LAZIS Dewan Dakwah	228/PH/BAZNAS/IX/2016; 021/HVR/SDP/BAZNAS/IX/2016	Jl. Kramat Raya No.45, RT.3/RW.4, Kramat, Senen, Central Jakarta 10450 Phone : 0213909059	1. Education 2. Economy 3. Dakwah 4. Health

No	Nama Lembaga	Rekomendasi	Alamat	Program
16	LAZ PZU (Persis)	No.349/PH/BAZNAS/X/2016; 025/HVR/SDP/BAZNAS/X/2016	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung- West Java, Indonesia Phone : 0224217436 Website : http://pzu.or.id	Program “Umat Peduli” : 1. Layanan Mustahik Pribadi 2. Layanan Mustahik Ibnu Sabil 3. Layanan Mustahik Gharimin 4. Layanan Mustahik Mualaf 5. Layanan Mustahik Lembaga 6. Bantuan Dana Bencana Alam

Lampiran 3. Prestasi dan Pencapaian Lembaga Zakat



Sumber: <http://rmaward.asia/news/gallery-2016-ramon-magsaysay-awards-event/>

RAMON MAGSAYSAY AWARD

Pada pertengahan 2016, **Dompot Dhuafa** menerima penghargaan setara Nobel tingkat Asia, yaitu Ramon Magsaysay Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada orang atau organisasi yang dengan pelayanan tanpa pamrihnya telah menawarkan

solusi bagi masyarakat di lingkungan mereka, Asia, dan dunia dalam berbagai permasalahan pembangunan manusia. Dewan Pengawas Ramon Magsaysay Award Foundation mengakui Dompot Dhuafa dan para pemimpinnya mendefinisikan ulang bentuk filantropi berbasis zakat di Indonesia, meningkatkan potensi agama Islam, terlepas dari keyakinan jutaan penerima manfaatnya.

SUPERQURBAN

Salah satu inovasi dalam hal pendistribusian daging kurban dilakukan oleh **Rumah Zakat**. Melalui Superqurban, daging kurban dikemas dalam bentuk kornet kalengan sehingga daging tersebut dapat bertahan



hingga tiga tahun. Oleh karena itu, daging kurban dapat mencapai daerah terpencil di

Sumber: http://images.sharinghappiness.org/Superqurban_SH_Papua.jpg

seluruh Indonesia yang biasanya membutuhkan banyak waktu bagi orang untuk mendistribusikan daging kurban. Memberikan daging kalengan ke daerah-daerah tersebut juga berisiko lebih kecil daripada menyalurkan binatang hidup.

TRENSAINS

Salah satu program pendidikan inovatif dari **LazisMU** adalah Trensains. Trensains adalah kependekan dari Pesantren Sains yang merupakan sintesis dari pesantren dan sekolah umum bidang sains. Trensains merupakan lembaga pendidikan setingkat SMA yang merupakan proyek baru di Indonesia, bahkan mungkin di dunia Islam karena kegiatan utamanya adalah mengkaji dan meneliti ayat-ayat semesta yang terkandung di dalam Al Quranul Karim dan Hadis Nabawi. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini merupakan kurikulum unifikasi, sehingga memiliki karakter kuat dalam integrasi Islam dan Sains. Misalnya, pada siang hari, para santri melakukan observasi dan meneliti di luar ruang kelas, pidato berbahasa asing, dan mengulas permainan dengan nalar matematika dan fisika. Sementara di malam hari, terdapat kegiatan “Tahajud Fisika” yang merupakan zona belajar santri di tengah malam dengan pendekatan *fun learning*. Santri belajar sambil berapi unggun menikmati jagung bakar.

MATABACA

Kesulitan hidup, terutama di bidang ekonomi, biasanya menjadi alasan bagi orang untuk mementingkan hal-hal yang bersifat materi daripada spiritual. Di antara orang-orang yang memiliki kecenderungan tersebut adalah tukang becak, yang biasanya berpenghasilan terbatas kendati telah bekerja keras. Oleh karena itu, **LAZ Nurul Hayat** memberikan perhatian lebih kepada para tukang becak itu dengan mengadakan pengajian rutin. Dengan pendekatan kekeluargaan, Nurul Hayat akhirnya berhasil menyatukan ribuan tukang becak dalam kelompok pengajian. Setiap bulan, para tukang becak datang ke masjid tempat berlangsungnya pengajian. Sebagai apresiasi atas kesediaan mereka untuk mengaji, Nurul Hidayat memberikan pengobatan gratis, pinjaman tanpa bunga, dan bantuan hari raya.

Lampiran 4. Rencana Strategis BAZNAS

A. Aspek Legalitas

Tabel 5.2. Aspek Legalitas

No	Key Performance Indicator	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Renstra BAZNAS 2016-2020 yang sudah diperbaiki	%	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Renstra BAZNAS Provinsi	%	0	50	80	100	100
3	Renstra BAZNAS Kabupaten/Kota	%	0	25	50	75	100
4	Pedoman/Peraturan BAZNAS yang sudah disahkan	jumlah	26	26	n.a.	n.a.	n.a.
5	Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ bagi yang memenuhi persyaratan	%	100	100	100	100	100
6	SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota diterima oleh BAZNAS	%	100	100	100	100	100

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2016 - 2020

B. Aspek Akuntabilitas dan Kepatuhan Syariah

Tabel 5.3. Aspek Akuntabilitas dan Kepatuhan Syariah

No	Key Performance Indicator	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	RKAT BAZNAS	%	100	100	100	100	100
2	RKAT BAZNAS Provinsi	%	100	100	100	100	100
3	RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
4	Laporan keuangan BAZNAS dan LAZ diaudit KAP setiap 30 Juni	%	100	100	100	100	100
5	Laporan keuangan BAZNAS Provinsi diaudit KAP setiap 30 Juni	%	n.a	100	100	100	100
6	Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota diaudit KAP setiap 30 Juni	%	n.a	n.a	10	20	30
7	Laporan BAZNAS kepada Presiden	Waktu	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli
8	Rakornas BAZNAS Provinsi	Kali	1	1	1	1	1
9	Rakornas LAZ	Kali	1	1	1	1	1
10	Rakorda BAZNAS Kabupaten/Kota oleh BAZNAS Provinsi	%	n.a	25	50	75	100
11	Kongres Zakat Nasional			V		V	
12	Kongres Zakat Dunia				V		

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2016 - 2020

C. Aspek IT dan Sistem

Tabel 5.4. Aspek IT dan Sistem

No	Key Performance Indicator	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	BAZNAS Provinsi yang telah menerapkan SiMBA dengan baik	%	100	100	100	100	100
2	Pembangunan Infrastruktur IT bagi BAZNAS Provinsi	Provinsi	8	15	22	30	34
3	BAZNAS Kab/Kota yang telah menerapkan SiMBA dengan baik	%	100	100	100	100	100
4	Pembangunan Infrastruktur IT bagi BAZNAS Kab/Kota	Kab/Kota	25	75	125	175	250
5	LAZ yang terintegrasi baik dengan SiMBA	%	75	100	100	100	100
6	Muzaki service diakses BAZNAS Provinsi	%	n.a	50	80	100	100
7	Muzaki service diakses BAZNAS Kab/Kota	%	n.a	25	50	75	100
8	Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan zakat nasional	Unit		1			
9	BAZNAS memiliki sarana <i>teleconference</i>			V			
10	BAZNAS Provinsi memiliki <i>teleconference</i>	Provinsi	n.a	8	16	25	34
11	BAZNAS Kab/Kota memiliki <i>teleconference</i>	Kab/Kota	n.a	10	100	200	514

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2016 - 2020

D. Aspek Pengumpulan dan Penyaluran

Tabel 5.5. Aspek Pengumpulan dan Penyaluran

No	Key Performance Indicator	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Aspek Pengumpulan							
1	Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul secara nasional naik secara signifikan	Triliun IDR	5,00	6,50	8,77	12,28	17,19
2	Database muzakki nasional individu	juta orang	3,33	4,33	5,85	8,19	11,46
3	Database muzakki nasional badan	ribu badan	1	2,5	5	7,5	10
Aspek Penyaluran							
1	Rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70%	Triliun IDR	3,50	4,55	6,14	8,59	12,04
2	Fakir Miskin Yang Dientaskan dari Garis Kemiskinan sebesar 1% setiap tahun dari jumlah orang miskin berdasarkan data BPS	Ribu orang	280	280	280	280	280
3	Terlaksananya program Zakat Community Development	Desa	40	81	121	141	161
4	Database mustahik BAZNAS	Waktu	Okt	Juli	Juli	Juli	Juli

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2016 - 2020

E. Aspek Pengembangan Amil

Tabel 5.6 Aspek Pengembangan Amil

No	Key Performance Indicator	Satuan	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi lembaga keuangan yang disupervisi oleh OJK.	%	n.a	n.a	n.a	10	100
2	Pusat Pendidikan dan Latihan Amil Zakat Nasional			V			
3	Amil BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Tersertifikasi	%	n.a	10	30	50	100
4	Indonesia sebagai contoh pengelolaan zakat dunia	%	n.a	n.a	10	50	100
5	Pusat Kajian Strategis BAZNAS		V				
6	Memiliki Gedung Kantor Pusat			V			
7	BAZNAS TV			V			

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2016 - 2020

ISBN 978-602-60689-0-3



Diterbitkan di Indonesia oleh:

Pusat Kajian Strategis

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat 10340, Indonesia

<http://www.puskasbaznas.com>